

LAPORAN AKHIR KAWASAN MANDIRI PANGAN TAHUN 2015



**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan hasil evaluasi awal tahun 2011 terhadap kegiatan Desa Mandiri Pangan, diketahui bahwa hasil pelaksanaan kegiatan di wilayah Papua-Papua Barat, wilayah perbatasan dan wilayah kepulauan menunjukkan perkembangan yang kurang signifikan jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Hal tersebut direkomendasikan dari hasil kajian PSP3 IPB kerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan, bahwa wilayah Papua-Papua Barat dan Kepulauan menunjukkan bahwa perlunya model pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah/kawasan yang terintegrasi di wilayah Papua-Papua Barat, Kepulauan, dan Perbatasan

Penanganan Kawasan Mandiri Pangan Papua-Papua Barat, Kepulauan dan Perbatasan mulai dilakukan pada tahun 2013 di 107 kawasan, 59 kabupaten/kota, pada 13 provinsi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat rawan pangan dengan karakteristik, berdasarkan ekologi dan kondisi geografis serta pergantian musim yang spesifik berbeda antar wilayah. Pada tahun 2015 kegiatan Kawasan dikembangkan lagi di 85 Kabupaten di 85 Kawasan di 24 Provinsi.

Untuk mengetahui kegiatan pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Papua-Papua Barat, Kepulauan dan Perbatasan dan Kawasan tahun 2015 terutama perkembangan kegiatan yang di mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pengembangan maka dibuat laporan akhir, hasil perkembangan kegiatan kawasan Papua-Papua Barat, Kepulauan dan Perbatasan dan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2015.

Desember 2015

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Sasaran	3
1.4. Output	3
1.5. Outcome	4
1.6. Benefit	4
1.7. Impact	4
BAB II. PELAKSANAAN KAWASAN MANDIRI PANGAN TAHUN 2015	5
2.1. Ruang Lingkup	5
2.2. Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan	10
2.2.1. Kawasan Mandiri Pangan (Papua-Papua Barat, Kepulauan, Perbatasan)...	12
2.2.2. Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2015	13
BAB III. KEGIATAN KAWASAN MANDIRI PANGAN DI PUSAT DAN DAERAH	15
3.1. Pelaksanaan Kegiatan di Pusat	15
BAB IV. PERMASALAHAN DAN PENUTUP	23
3.1. Permasalahan	23
3.1. Penutup	32

LAMPIRAN

1. Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan TA. 2015 (Tahap Pengembangan)	34
2. Pemanfaatan Bansos Kawasan Mandiri Pangan TA. 2013 Perbatasan (Tahap Kemandirian)	38
3. Pemanfaatan Bansos Kawasan Mandiri Pangan TA. 2013 Kepulauan (Tahap Kemandirian)	46
4. Pemanfaatan Bansos Kawasan Mandiri Pangan TA. 2013 Papua-Papua Barat (Tahap Kemandirian)	50
5. Rencana Usaha Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 yang selanjutnya menjadi UU No.18/2012 tentang Pangan. Pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional. Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan. Permasalahan yang muncul lainnya di dalam distribusi. Stok pangan yang tersedia sebagian besar di daerah produksi harus didistribusikan antar daerah/antar pulau. Namun tidak jarang sarana dan prasarana distribusi masih terbatas dan kadang lebih mahal daripada distribusi dari luar negeri.

Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian pangan, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan di perdesaan. Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur ganda/*twin track strategy*, yaitu: (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung. Sejak tahun 2006, Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kedua strategi tersebut melalui Kegiatan Desa

Mandiri Pangan (Demapan). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga, sehingga dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga, yang akhirnya berdampak terhadap penurunan kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di perdesaan, sejalan dengan salah satu tujuan *Millenium Development Goals (MDGs)*, yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai setengahnya di tahun 2015.

Kegiatan Desa Mandiri Pangan merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan yang dalam pelaksanaannya memerlukan keterlibatan dan sinergitas antar instansi dan stakeholder yang terkait. Kriteria Desa yang terpilih merupakan desa rawan pangan berdasarkan Peta FIA (*Food Insecurity Atlas*) / FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) atau berdasarkan angka kemiskinan tertinggi dari data BPS. Berdasarkan Kriteria desa tersebut dilakukan survei Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) untuk mengetahui karakteristik rumahtangga miskin sasaran dan jumlah angka kemiskinan yang tertinggi. Kriteria lokasi pelaksana kegiatan Desa Mandiri Pangan, termasuk desa rawan pangan (minimal 30 persen penduduknya terdiri dari Rumah Tangga Miskin) berdasarkan DDRT, memiliki potensi (SDA dan SDM) yang belum dikembangkan, serta adanya respon aparat desa dan masyarakat terhadap pembangunan ketahanan pangan.

Pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan dilakukan selama empat tahap (4 tahun), yang meliputi : Tahap Persiapan, Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan dan Tahap Kemandirian. Berdasarkan hasil evaluasi awal tahun 2011 terhadap kegiatan Desa Mandiri Pangan, diketahui bahwa hasil pelaksanaan kegiatan di wilayah Papua-Papua Barat, wilayah perbatasan, dan wilayah kepulauan menunjukkan perkembangan yang kurang efektif jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Permasalahan yang mendasar di wilayah kawasan diantaranya: (1) tingginya angka kemiskinan; (2) masih menonjolnya masalah kesehatan yang dicirikan dengan tingginya angka *underweight* pada balita, (3) terbatasnya akses pangan masyarakat yang dipengaruhi oleh relatif rendahnya kemampuan SDM, rendahnya daya beli, rendahnya dukungan sarana prasarana: transportasi, akses terhadap air bersih dan kesehatan, serta (4) terbatasnya sarana informasi dan kemampuan berusaha.

Sedangkan permasalahan spesifik yang timbul di kawasan Papua-Papua Barat, perbatasan, dan kepulauan diantaranya: (1) karakteristik sosial budaya di Papua-Papua Barat berbeda dengan wilayah lainnya, diantaranya kelembagaan adat lebih diterima masyarakat, dibandingkan dengan kelembagaan formal yang ada di kampung; (2) keterisolasian wilayah perbatasan antar negara, yang disebabkan oleh keterbatasan akses dan sarana prasarana; (3) rendahnya aksesibilitas kecukupan pangan masyarakat wilayah kepulauan, yang disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana, pengaruh perubahan cuaca dan iklim, ketertinggalan akses informasi dan komunikasi; (4) potensi sumber daya lokal belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan kawasan sesuai dengan karakter ekologisnya.

Permasalahan tersebut diantaranya teridentifikasi dari hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian Institut Pertanian Bogor (PSP-IPB, 2012). Hasil kajian merekomendasikan perlunya model pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah/kawasan yang terintegrasi di wilayah Papua-Papua Barat, wilayah kepulauan, dan wilayah perbatasan. Implementasi hasil kajian ditindaklanjuti melalui pengembangan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2013 di Papua Papua Barat, Kepulauan dan Perbatasan. Berdasarkan hasil evaluasi awal tahun 2011 terhadap kegiatan Desa Mandiri Pangan, diketahui bahwa hasil pelaksanaan kegiatan di wilayah Papua-Papua Barat, wilayah perbatasan dan wilayah kepulauan menunjukkan perkembangan yang kurang signifikan jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Hal tersebut direkomendasikan dari hasil kajian wilayah Papua-Papua Barat dan Kepulauan menunjukkan bahwa perlunya model pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah/kawasan yang terintegrasi di wilayah Papua-Papua Barat, Kepulauan, dan Perbatasan.

1.2. TUJUAN

- Tujuan umum kegiatan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan: memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri;
- Tujuan khusus kegiatan Kawasan Mandiri Pangan: (1) mengembangkan perekonomian kawasan adat di Papua; (2) mengembangkan perekonomian kawasan perbatasan antar negara; (3) mengembangkan cadangan pangan masyarakat kawasan kepulauan; (4) meningkatkan potensi pengembangan pangan yang mendukung terwujudnya swasembada pangan dan ketahanan pangan masyarakat.

1.3. SASARAN

Sasaran kegiatan Kawasan Mandiri Pangan:

- Sasaran pengelolaan kawasan mandiri pangan perbatasan adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) pada kawasan perbatasan Negara di 64 kawasan 36 Kabupaten dan 12 Provinsi
- Sasaran pengelolaan Kawasan Mandiri Pangan Kepulauan adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan rawan pangan di 22 kawasan 12 Kabupaten dan 4 Provinsi
- Sasaran pengelolaan Kawasan Mandiri Pangan Papua-Papua Barat adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) pada kawasan Papua-Papua Barat di 23 kawasan 12 Kabupaten dan 2 Provinsi
- Sasaran kegiatan Kawasan Mandiri Pangan adalah Rumah Tangga Miskin (RTM)/Rawan Pangan yang mempunyai potensi pengembangan komoditas unggulan spesifik lokal tahap penumbuhan (tahun II) di 85 kawasan, 85 kabupaten/kota, 24 provinsi.

1.4. OUTPUT

- terselenggaranya pelatihan dan pendampingan untuk: (1) pengembangan usaha dan jaringan pemasaran usaha; (2) penguatan tabungan masyarakat; (3) dan peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat oleh kader gizi perdesaan dan TPD; dan
- terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lintas sektor untuk pengembangan infrastruktur perdesaan.

1.5. Outcome

- meningkatnya modal, tabungan masyarakat, dan jaringan pemasaran;
- perubahan pola pikir masyarakat, peningkatan ketrampilan dan aksesibilitas Pangan;
- meningkatnya sarana dan prasarana perdesaan; dan
- meningkatnya layanan kesehatan dan gizi masyarakat perdesaan.
- Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lintas sektor untuk pengembangan infrastruktur perdesaan.

1.6. Benefit

- Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat
- Berkembangnya modal usaha kelompok

1.7. Impact

Terwujudnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat

BAB II

PELAKSANAAN KAWASAN MANDIRI PANGAN TAHUN 2015

2.1. Ruang Lingkup

Rancangan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di Papua-Papua Barat, Kepulauan, dan Perbatasan dilaksanakan selama 5 tahap (5 tahun), meliputi Tahap Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian, dan Strategi Keberlanjutan Kegiatan. Dalam tiga tahap pertama, pembinaan dan pendampingan dilaksanakan utamanya melalui kegiatan APBN, dua tahun terakhir diharapkan peran pemerintah daerah akan lebih dominan. Berdasarkan disain ini diharapkan akan lebih terjamin keberlanjutan pengembangan dan manfaat dari implementasi kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan dengan pendekatan wilayah kecamatan, melalui (1) identifikasi permasalahan dan pemetaan potensi sumberdaya, (2) pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, (3) penguatan kelembagaan FKK, LKK, Kelompok untuk mendukung sistem ketahanan pangan di kawasan, dan (4) koordinasi untuk sinkronisasi dan integrasi program lintas sektor dan sub sektor.

Identifikasi permasalahan dan potensi dilakukan dengan pendekatan ekologi untuk melihat potensi sumberdaya lokal, karakteristik wilayah dan karakteristik masyarakat adat, agar dapat dilakukan pendekatan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai hasil pemetaan potensi wilayah kawasan. Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk peningkatan kapasitas individu, masyarakat dan penguatan kelembagaan melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan akses untuk peningkatan keterampilan, perubahan pola pikir, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial budaya. Pendampingan masyarakat juga diarahkan untuk penguatan Forum Komunikasi Kawasan, Lembaga Keuangan, serta penguatan Sistem Ketahanan Pangan kawasan. Penguatan sistem ketahanan pangan dilakukan untuk menjamin peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, peningkatan cadangan pangan, akses fisik, daya beli masyarakat, kualitas pangan, dan diversifikasi pangan. Adapun ruang lingkup kegiatan Kawasan yaitu :

a. Kawasan Mandiri Pangan Perbatasan

Pengembangan kawasan perbatasan merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu kawasan yang dihuni komunitas yang mengalami berbagai permasalahan sosial dan ekonomi karena keterbatasan wilayah dan lokasi menjadi wilayah yang maju, yang komunitasnya memperoleh kesejahteraan dan kualitas hidup setara dengan komunitas masyarakat non perbatasan. Selama ini pendekatan perencanaan pengembangan kawasan perbatasan lebih banyak ditekankan pada pendekatan keamanan (*security approach*). Namun seiring dengan perkembangan kajian-kajian tentang kawasan perbatasan bahwa kawasan perbatasan darat dan laut antar negara merupakan

kawasan yang masih rentan terhadap infiltrasi ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya dari negara lain. Di sisi lain, kawasan perbatasan antar negara masih dihadapkan pada permasalahan yang sangat mendasar seperti rendahnya kesejahteraan masyarakat, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, serta minimnya infrastruktur di sektor perhubungan dan sarana kebutuhan dasar masyarakat.

Ketertinggalan pembangunan kawasan perbatasan, baik darat maupun laut dengan negara tetangga secara sosial maupun ekonomi dikhawatirkan dapat menyebabkan kerawanan pangan jangka panjang. Pelaksanaan pengembangan kawasan mandiri pangan perbatasan diarahkan pada kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong kawasan mandiri pangan perbatasan, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Negara (RTRWN). Kawasan mandiri pangan perbatasan berada di pusat perkotaan yang merupakan: (1) pos pemeriksaan perbatasan negara; (2) pintu gerbang internasional yang menghubungkan kedua negara; (3) simpul utama transportasi antar wilayah; dan (4) pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu mendorong wilayah sekitarnya.

Terkait dengan pelaksanaan pengembangan kawasan mandiri pangan perbatasan, pusat perkotaan di masing-masing kecamatan yang berbatasan dengan negara tetangga adalah titik tumbuh ekonomi di kawasan perbatasan. Titik tumbuh ekonomi kawasan yang terletak di kota kecamatan tersebut setidaknya memperhatikan: (1) potensi sumber daya, (2) potensi permintaan, dan (3) kondisi daerah perbatasan. Perbedaan potensi sumber daya yang berada di wilayah perbatasan dan negara tetangga akan berdampak pada potensi permintaan terhadap sumber daya yang dibutuhkan baik di wilayah perbatasan atau di negara tetangga. Jika permintaan akan sumber daya di negara tetangga lebih tinggi dan bernilai maka sumber daya tersebut akan mengalir ke negara tetangga.

Selain itu terkait dengan kondisi di daerah perbatasan, jika pengawasan dan pengamanan yang lemah maka sumber daya di daerah perbatasan akan mudah keluar karena kondisi di daerah perbatasan tidak kondusif. Oleh karenanya, penguatan potensi sumber daya lokal dengan mengembangkan ekonomi lokal di kawasan mandiri pangan perbatasan merupakan langkah yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan. Penguatan ekonomi lokal melalui kecamatan sebagai titik tumbuh kawasan perbatasan diharapkan kawasan yang dijadikan kawasan mandiri pangan perbatasan tersebut memiliki daya magnet yang kuat dalam alur perekonomian. Pasar sebagai tempat berkumpulnya pembeli dan penjual merupakan simbol suatu perekonomian. Berfungsinya pasar kecamatan di wilayah perbatasan nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Hal ini dapat dilustrasikan pada gambar berikut ini.

b. Kawasan Mandiri Pangan Kepulauan

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan kawasan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dengan mengikuti konsepsi wilayah. Konsepsi wilayah dimaksudkan sebagai konsepsi relasi kerjasama dalam satu pulau, dalam wilayah pesisir, Konsepsi kawasan yang terdiri dari beberapa pulau dalam satu kabupaten, konsepsi relasi kerjasamanya adalah kerjasama antar pulau, dengan memperhatikan kesamaan potensi sumberdaya alam. Komponen kegiatan, meliputi : (1) identifikasi permasalahan dan pemetaan potensi kawasan kepulauan sesuai dengan tipe kawasan; (2) pemberdayaan masyarakat di kawasan kepulauan sesuai dengan potensi dan karakteristik tipe kawasan kepulauan; (3) penguatan kelembagaan; (4) pengembangan sistem ketahanan pangan; dan (5) dukungan sarana prasarana melalui koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program lintas sektor berdasarkan usulan rencana pembangunan kawasan.

Identifikasi dilakukan untuk melihat potensi sumberdaya lokal, karakteristik wilayah dan masyarakat, sehingga dapat dipetakan potensi wilayah kawasan. Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk peningkatan kapasitas individu dalam pengembangan usaha sesuai potensi kawasan. Penguatan kelembagaan kawasan melalui pembentukan forum komunikasi kawasan (FKK) dengan memberikan pelatihan, pendampingan masyarakat, dan peningkatan akses untuk peningkatan keterampilan, perubahan pola pikir, dan peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial budaya. Sedangkan penguatan sistem ketahanan pangan dilakukan untuk menjamin peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, peningkatan cadangan pangan, akses fisik, daya beli masyarakat, kualitas pangan, dan diversifikasi pangan. Pola pelaksanaan kegiatan kawasan kepulauan dapat dilakukan dengan 4 (empat) tipe yaitu :

Kawasan kepulauan Tipe A adalah : kawasan yang dalam satu kabupaten tidak terdapat pulau kecil setingkat kecamatan dan berada pada garis pantai/pesisir (lokasi pelaksana di kawasan pesisir).

Kawasan kepulauan Tipe B adalah: kawasan yang dalam satu kabupaten terdapat pulau - pulau kecil setingkat kecamatan yang akses pangannya tergantung pada kabupaten induk dan pada musim tertentu mengalami kelangkaan pasokan pangan.

Kawasan kepulauan Tipe C adalah: kawasan yang dalam satu kabupaten terdapat pulau kecil yang terdiri dari beberapa kecamatan yang akses pangannya tergantung dari kabupaten lain, dan pada musim tertentu mengalami kelangkaan pasokan pangan.

Kawasan kepulauan Tipe D adalah: kawasan yang dalam satu kabupaten terdapat pulau kecil yang terdiri dari beberapa kecamatan yang akses pangannya tergantung dari propinsi

lain, dan pada waktu tertentu mengalami kelangkaan pasokan pangan dari wilayah produsen.

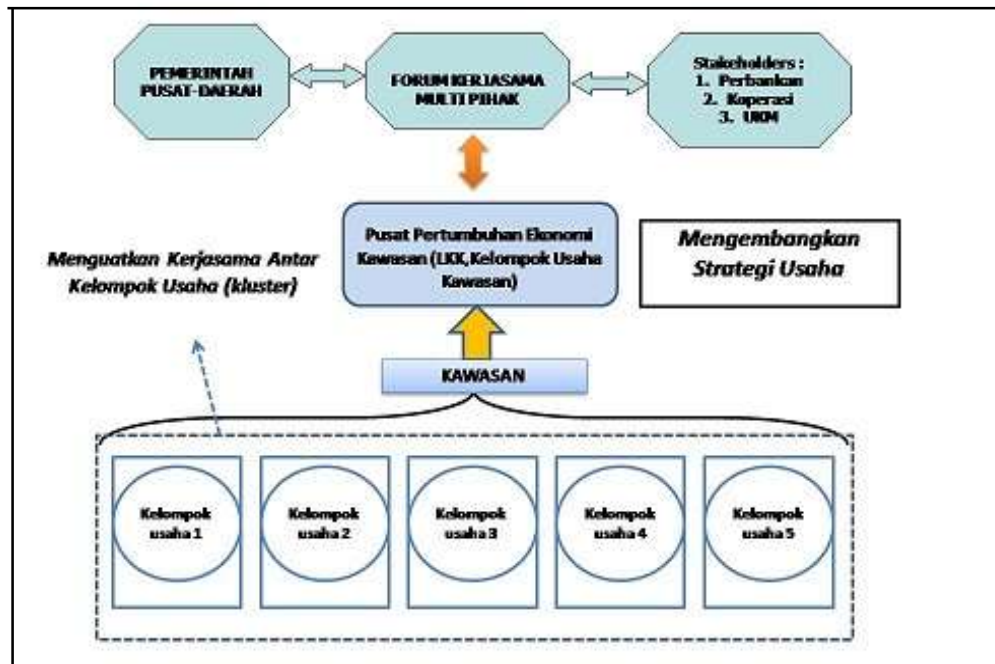
c. Kawasan Mandiri Pangan Papua-Papua Barat

Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Papua-Papua Barat adalah pendekatan wilayah kecamatan yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat adat dengan mengikuti konsepsi adat setempat dan memiliki kesamaan ekologi, potensi sumberdaya alam, permasalahan, serta mata pencaharian, melalui: (1) identifikasi permasalahan dan pemetaan potensi wilayah; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) penguatan kelembagaan; (4) pengembangan sistem ketahanan pangan; dan (5) koordinasi lintas sektor untuk sinkronisasi dan integrasi program lintas sektor.

Identifikasi pengembangan wilayah Papua-Papua Barat berbasis sosial budaya dilakukan dengan pendekatan ekologi untuk melihat potensi sumberdaya lokal, karakteristik wilayah dan masyarakat adat, agar dapat dilakukan pemetaan potensi wilayah kawasan. Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk peningkatan kapasitas individu, masyarakat dan penguatan kelembagaan melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan akses untuk peningkatan keterampilan, perubahan pola pikir, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial budaya. Pendampingan masyarakat juga diarahkan dalam rangka penguatan kelembagaan adat, kawasan, dan permodalan kawasan melalui koordinasi program lintas sektor untuk penguatan sistem ketahanan pangan. Penguatan sistem ketahanan pangan dilakukan untuk menjamin peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, peningkatan cadangan pangan, akses fisik, daya beli masyarakat, kualitas pangan, dan diversifikasi pangan.

d. Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2015

Pada tahun 2015 kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dialokasikan di 85 kawasan 85 kabupaten. Lokasi Kawasan baru (Tahap Persiapan), berdasarkan lanjutan prioritas 3 s.d 5 Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan, dan hasil analisis SKPG yang menunjukkan Angka Kecukupan Gizinya rendah. Tujuan kegiatan Kawasan mandiri Pangan adalah memberdayakan masyarakat miskin/rawan menjadi kaum mandiri untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Kegiatan Kawasan mandiri pangan dilaksanakan dalam 5 tahapan yaitu tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan, kemandirian dan exit strategi.



Pendekatan Kegiatan Kawasan

Pendekatan kegiatan dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk mengubah perilaku agar mengenali potensi dan sumberdaya setempat, sehingga dapat mengelola potensinya untuk mengembangkan usaha produktif di kawasan secara berkelanjutan. Dukungan dan fasilitasi peran pemerintah serta stake holder (pemangku kepentingan) terkait sangat diharapkan untuk mendukung komponen-komponen pemberdayaan, pendampingan dan penguatan modal sehingga kegiatan usaha yang terbentuk di masing-masing desa dapat dikembangkan dalam bentuk kluster yang didukung secara teknis oleh instansi terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dapat terbentuk, tumbuh dan menggerakkan perekonomian desa maupun kawasan.

Terbentuknya pusat ekonomi kawasan dapat dilakukan melalui: (1) penguatan kelembagaan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan: kelompok afinitas sebagai pelaku dan pengembang usaha produktif secara berkelompok di desa, FKK sebagai penggerak dan pengendali pembangunan ketahanan pangan tingkat kawasan, dan LKK sebagai layanan permodalan usaha produktif kawasan; (2) PPL/Penyuluh pertanian lapang bersama FKK mendampingi kelompok dan LKK dalam penguatan sistem ketahanan pangan diarahkan untuk membangun sistem ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi; (3) dukungan sarana prasarana dari lintas sektor dan stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan; dan (4) dukungan daerah dalam bentuk cost

sharing pembiayaan pendampingan dan pelatihan kepada kelompok, FKK, LKK, dan pendamping, serta penyediaan APBD I/II untuk penguatan modal kelompok.

2.2. Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan

Pemerintah bersama masyarakat sebagai penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: a. kedaulatan; b. kemandirian; c. ketahanan; d. keamanan; e. manfaat; f. pemerataan; g. berkelanjutan; dan h. keadilan.



Ketahanan pangan meliputi tiga sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi. Implementasi kegiatan di lapangan perlu didukung oleh 9 (sembilan) komponen, antara lain : (1) ketersediaan lahan yang sehat, (2) ketersediaan sumberdaya air sepanjang tahun, (3) tidak adanya lahan terlantar, (4) tersedia sumber benih dan indukan unggul, (5) tidak adanya limbah pertanian, (6) tersedianya pasar, (7) memiliki cadangan pangan desa, (8) tidak memiliki penduduk dibawah garis kemiskinan, (9) tidak adanya limbah industry dan sisa makanan.

Adapun langkah-langkah operasional sebagai berikut :

(1) Lahan di setiap desa sehat

- Melakukan penyehatan seluruh lahan pertanian, baik sehat secara biologis maupun fisik.
- Menyiapkan metoda/cara dan mendampingi petani dalam pengolahan lahan,
- Menyiapkan kebutuhan unsur hara dan nutrisi ternak.

(2) Desa memiliki sumber air sepanjang tahun

- Menyiapkan sarana penampungan air (water harvesting)/situ/embung-embung atau sumur resapan agar lahan-lahan pertanian memiliki sumber air pada musim kemarau.
- Memanfaatkan situ/embung/embung selama musim hujan untuk kegiatan produktif dan menghasilkan tambahan sumber bahan pangan.
- Luas situ/embung-embung minimal 10 % dari luas lahan yang memerlukan pengairan pada saat musim kemarau.

(3) Tidak ada lahan terlantar di desa

- Memanfaatkan setiap jengkal tanah yang ada di desa untuk ditanami,
- Menyiapkan teknologi pakan ternak,
- Menyiapkan teknologi pengolahan hasil-hasil pertanian, baik untuk pangan (paska panen), energi, maupun industri lainnya,
- Memperkuat pasar dalam negeri untuk memanfaatkan hasil-hasil pengolahan

pertanian menjadi bahan-bahan industri yang kompetitif, (e) Menyiapkan sarana untuk memudahkan pengumpulan hasil-hasil pertanian.

(4) Benih dan indukan unggul tersedia di setiap desa

(a) Mengkonservasi benih dan indukan unggul yang ada di masing-masing daerah, serta mikroba penting dalam bank isolat. (b) Menyediakan benih dan indukan unggul kepada para petani, terutama benih dan indukan unggul yang berasal dari sumber domestik dan penelitian dalam negeri. (c) Menyiapkan pasangan mikroba tanah lainnya untuk meningkatkan produktivitas pertanian berdasarkan lahan yang sehat.

(5) Di Desa tidak ada limbah pertanian

(a) Menyiapkan teknologi pengolahan limbah pertanian menjadi produk-produk industri, baik untuk kebutuhan langsung maupun kebutuhan antara. (b) Membangun konektivitas kota-desa untuk mengembalikan hara yang diambil dari desa ke kota untuk dikembalikan lagi ke kota, (c) Menyiapkan perangkat lunak pengautruan pemanfaatan energi nabati (biofuel) yang dihasilkan baik di desa maupun di kota. Menyediakan teknologi pengolahan limbah dan sisa makanan untuk dapat dimanfaatkan sebagai nutrisi tanaman maupun pakan ternak maupun sumber-sumber energi alternatif.

(6) Setiap desa memiliki pasar dan infrastuktur penunjangnya

(a) Membangun pasar beserta infrastruktur jaringan antar pasar (jalan) maupun pergudangan dan penyimpanan tersedia di setiap desa. (b) Mengadvokasi agar pasar-pasar modern memberikan ruang yang cukup bagi komoditas pertanian di desa tersebut

(7) Setiap Desa memiliki Cadangan Pangan

(a) Membangun infrastruktur cadangan pangan, baik untuk menyimpan pangan yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat desa tersebut, maupun cadangan pangan hidup dari lahan-lahan sehat yang khusus digunakan sebagai cadangan pangan hidup (secara kolektif). (b) Membangun gudang-gudang penyimpanan di pasar yang dapat dimanfaatkan sebagai penitipan cadangan pangan masyarakat desa.

(8) Tidak ada penduduk dibawah garis kemiskinan

(a) Masyarakat miskin yang sebagian besar didesa dikurangi dengan menyediakan lapangan usaha pertanian baik secara monokultur maupun kombinasi antara tanaman dan ternak. (b) Mengubah mental pertanian, dari hanya sekedar memanen menjadi pemerliharaan yang intensif dengan memanfaatkan bahan-bahan dan sumberdaya lokal yang ada. (c) Lahan-lahan yang sehat dapat memberikan nutrisi bagi tanaman, maupun sumber pakan ternak, yang dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, sehingga tidak terjadi kekurangan pakan. (d) Melakukan advokasi agar setiap desa dapat menangani masalah pangan (kekurangan/kelebihan dan ketidakmampuan rumah tangga) yang dihadapi oleh penduduk desa yang bersangkutan

(9) Tidak ada limbah dan sisa makanan

(a) membangun konektivitas desa-kota untuk mengembalikan hara yang dikirim kekota kembali ke desa. (b) Melakukan advokasi pemanfaatan pertanian sebagai sumber obat-obatan aman dan pakan. (c) Melakukan pengembangan industri rintisan berbahan baku pertanian untuk memperluas pasar pertanian yang selama ini hanya menjadi produk pangan dengan mendorong berkengnya produk-produk industri non pangan yang memanfaatkan bahan-bahan pertanian.

2.2.1. Kawasan Mandiri Pangan (Papua-Papua Barat, Kepulauan dan Perbatasan)

Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2015 telah memasuki tahap pengembangan, kegiatan ini dilaksanakan pada 3 wilayah yaitu Papua-Papua Barat, Kepulauan dan Perbatasan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pengembangan diarahkan untuk: peningkatan kapasitas individu, kelompok dan kelembagaan, pengembangan usaha produktif dalam rangka penguatan sistem ketahanan pangan. Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lintas sektor dalam rangka dukungan penyediaan pemasaran dan penguatan permodalan kawasan

Pelaksanaan kegiatan kawasan mandiri pangan tahun 2015 telah memasuki tahap pengembangan dengan lokasi kawasan yang masih tetap di 107 kawasan, 60 Kabupaten/Kota, 13 Provinsi dan di tahap ke dua ini masih diberikan dana bansos di setiap kawasan sebesar Rp. 200.000.000.

a. Lokasi Kawasan

Lokasi Kawasan Mandiri Pangan tahun 2015 telah dilaksanakan di 13 Provinsi 60 Kabupaten di 107 Kawasan. Namun di Provinsi NTT terjadi pengurangan lokasi Kawasan di Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Belu mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Malaka.

b. Pemanfaatan Dana Bansos

Pencairan dana bansos mengacu pada Pedoman Pengelolaan Bansos Kementan Tahun 2015. Sebelum pencairan dana bansos tahap III, perlu dilakukan evaluasi pemanfaatan dana bansos tahap I dan II level desa dikawasan dilakukan oleh provinsi dan kab/kota pada bulan April – Mei 2015. Kelompok pengolahan dan pemasaran yang baru terbentuk dinilai dari potensi sumberdaya yang dimilikinya baik sarana pengolahan dan pemasaran, agar dibina mengajukan RUK sesuai kebutuhan, khusus pengolahan dan sarana pemasaran. Hasil evaluasi dengan Klasifikasi Tinggi (KT) direkomendasi untuk pencairan dana bansos tahap III oleh PPK dengan criteria, yaitu salah satu rekening kelompok yang sudah ditetapkan, selanjutnya diserahkan kepada LKK untuk mengelola dana bansos kawasan atau langsung ke rekening LKK, namun apabila hasil evaluasi menunjukkan klasifikasi sedang dan rendah (KS dan KR) provinsi dan kab/kota meneruskan pembinaan sampai dengan bulan September dan dievaluasi kembali. Jika menunjukkan klasifikasi tinggi (KT) direkomendasi untuk dicairkan dana bansos tahap III, namun sebaliknya apabila hasil evaluasi tetap menunjukkan klasifikasi sedang atau rendah (KS atau KR)

maka dana tidak boleh dicairkan ke rekening. Pencairan dana bansos tahap III harus sesuai dengan RUK besar yang disusun oleh kawasan atas usulan kegiatan dari kelompok masing-masing desa dikasawan, berdasarkan hasil Rencana Pembangunan Wilayah Kawasan (RPWK) yang disusun oleh Kelompok, Pendamping, FKK, dan LKK. RUK disusun oleh kawasan merupakan rekapitulasi kegiatan kelompok dari masing-masing desa, selanjutnya diajukan bersama rekening salah satu kelompok yang disepakati atau langsung ke rekening LKK. Setelah dana bansos ditransfer ke rekening kelompok kemudian ditarik dan diserahkan ke LKK dengan berita acara penyerahan. Selanjutnya LKK membukukan dan mendistribusikan kepada kelompok atas dasar RUK yang disampaikan dari desa-desa (kelompok). RUK yang disusun oleh kelompok, diajukan kepada LKK untuk mendapatkan pinjaman modal atas persetujuan FKK dan Pendamping, setelah FKK dan pendamping melakukan verifikasi di lapangan atas dasar RUK yang diusulkan oleh desa (kelompok), LKK sebelum mengeluarkan pinjamann modal kepada kelompok, LKK dan kelompok membuat Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bansos tersebut. Isi surat perjanjian antara lain: (1) untuk usaha produktif; (2) waktu pinjaman berdasarkan lama usaha yang dikembangkan. Pada tahun 2015 dana bansos yang sudah dicairkan sampai dengan bulan Desember 2015 di 107 kawasan sebesar 100%. Sehingga total bansos yang diterima di Kawasan Mandiri Pangan Perbatasan, Kepulauan dan Papua-Papua Barat di 3 tahapan sebesar Rp.21.400.000.000 dapat dilihat pada tabel (terlampir).

c. Kegiatan Usaha Produktif

Perkembangan kegiatan usaha di Kawasan Mandiri Pangan tahun 2015 terdiri dari *non farm, off farm, non farm*. Dari hasil laporan daerah di ketahui kegiatan usaha yang dilakukan tergantung kondisi daerah dan kebutuhan yang ada di kawasan, untuk tahun 2015 kegiatan usaha sudah mulai mengarah pada kegiatan budidaya pertanian, peternakan dan perikanan.

2.2.2. Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2015

Pada tahun 2015 kegiatan Kawasan Mandiri Pangan merupakan pengembangan dari kegiatan Mandiri Pangan dan Kawasan Kepulauan, Perbatasan dan Papua-Papua Barat. Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2015 di 24 Provinsi, 85 Kabupaten dan 85 Kawasan. Pendekatan kegiatan dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk mengubah perilaku agar mengenali potensi dan sumberdaya setempat. Penentuan lokasi Kawasan Desa Mandiri Pangan berdasarkan hasil FSVA 2009, 2010 tingkat kecamatan dan Kabupaten prioritas 3 s.d 5 dan AKG (Angka Kecukupan Gizi). Tahapan pelaksanaan Kawasan Mandiri Pangan melalui tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan, kemandirian dan strategi keberlanjutan, kegiatan Kawasan Desa Mandiri Pangan tahun 2015 pada tahap persiapan tidak diberikan dana bansos akan tetapi diberikan pada tahap ke dua pada tahap penumbuhan.

Pada tahap persiapan lebih difokuskan pada memperkuat kelembagaan kelompok, pendampingan dan Forum komunikasi kawasan. Pada tahap persiapan di Kawasan Mandiri Pangan ditekankan pada bentuk-bentuk kerjasama baik yang dilakukan oleh pusat maupun daerah melalui pembagian tugas dan kewenangan dalam aspek pemberdayaan, pendampingan, pembinaan, pelatihan dan monitoring dan evaluasi.

Untuk dana penyaluran bantuan pemerintah diberikan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: Tahun Kedua, berfokus pada budidaya, kegiatan usaha on farm (pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan) Sarana dan prasarana fisik (irigasi, saprodi pertanian, air bersih, alsintan); Tahun Ketiga, berfokus pada teknologi pengolahan, penguatan usaha produktif tahun kedua, dan Usaha of farm (alat-alat pengolahan hasil dan pengemasan) untuk peningkatan nilai tambah. ; Tahun Keempat, berfokus pada kegiatan pemasaran, melalui pengembangan jaringan pasar dan permodalan, serta penguatan kelembagaan peningkatan gizi.

BAB III
KEGIATAN KAWASAN MANDIRI PANGAN
di PUSAT DAN DAERAH

3.1. Pelaksanaan Kegiatan di Pusat

a. Pedoman Umum Desa Mandiri Pangan

Pada tahun 2015 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membuat Pedoman Umum Desa Mandiri Pangan yang. Ruang lingkup Pedoman Desa Mandiri Pangan tahun 2015 terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Konsep Umum Desa Mandiri Pangan; (3) Pelaksanaan Kegiatan; (4) Organisasi dan Tata Kerja; (5) Pembiayaan; (6) Pemantauan dan Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan, serta Pelaporan; (7) Penutup.

Terbatasnya kecukupan dan kelayakan mutu pangan berkaitan erat dengan masalah ketersediaan pangan (*availability of food*), daya beli dan akses kepada pangan seperti beras misalnya. Di samping itu, perilaku dan budaya yang membedakan perlakuan dalam pengaturan dan pembagian makan antara anggota keluarga juga berpengaruh terhadap pemenuhan kecukupan pangan.

Pada tahun 2015, kegiatan Desa Mandiri Pangan sudah selesai tahap kemandirian dan pada tahun 2016 dikembangkan lebih lanjut menjadi Kawasan Mandiri Pangan, sehingga Ruang lingkup kegiatan Desa Mandiri Pangan terdiri dari Kawasan Mandiri Pangan baru diluar Kepulauan, Perbatasan, Papua dan Papua Barat dan Kawasan Mandiri Pangan Wilayah Perbatasan, Kepulauan, Papua dan Papua Barat.

Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan dalam 5 (lima) tahap semalan 5 (lima) tahun: Tahap Persiapan (tahun I) berfokus pada kapasitas individu dan kelembagaan ekonomi, Tahap Penumbuhan (tahun II) berfokus pada penumbuhan usaha-usaha kelompok, Tahap Pengembangan (tahun III) berfokus pada pengembangan sarana dan prasarana, Tahap Kemandirian (tahun IV) berfokus pada peningkatan status gizi dan kesehatan, dan Strategi Keberlanjutan Kegiatan (tahun V) berfokus pada pematapan kelembagaan dan ekonomi kawasan.

b. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan

➤ **Kepulauan**

Tujuan Kawasan Mandiri Pangan Kepulauan yaitu : memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan di kawasan kepulauan menjadi kaum mandiri. tujuan khusus yaitu mengembangkan ketersediaan dan cadangan pangan di kawasan kepulauan. Sedangkan sasaran 1) Rumah Tangga Miskin (RTM) dan rawan pangan di 24 kawasan, 12 kabupaten/kota, pada 4 provinsi, yaitu : Bangka Belitung (Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Tengah), Kepulauan Riau (Natuna dan Lingga), Nusa Tenggara Timur (Sumba Barat, Sumba Timur, Sikka, Ende, Lembata), Maluku

(Maluku Tenggara, Kota Tual), 2) mengembangkan Kawasan Mandiri Pangan Kepulauan untuk pemenuhan ketersediaan pangan masyarakat. 3) mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan dan hortikultura, kelembagaan, dan budaya lokal, 5) rancangan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Kepulauan, dilaksanakan selama 5 tahun dalam 5 tahap, meliputi Tahap Persiapan, Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, Tahap Kemandirian, dan Strategi Keberlanjutan Kegiatan. Pada tahap pertama sampai dengan tahap ketiga, pembinaan dan pendampingan dilaksanakan oleh dana APBN. Pada tahun keempat dan kelima diharapkan peran pemerintah daerah lebih dominan. Untuk tahun 2015 kegiatan Kawasan Mandiri Pangan telah memasuki tahap kemandirian dan sudah tidak diberikan dana bansos lagi, kelompok harus sudah mulai mengembangkan hasil produksinya.

➤ **Papua-Papua Barat**

Upaya perwujudan ketahanan pangan di Provinsi Papua dan Papua Barat telah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan melalui kegiatan Kawasan Mandiri Pangan sejak tahun 2013 di 23 Kawasan, 12 Kabupaten/Kota, terdiri dari: 16 kawasan di 8 kabupaten/kota Provinsi Papua dan 7 kawasan di 4 kabupaten Provinsi Papua Barat.

Sedangkan ruang lingkup kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Papua-papua Barat Pangan dilaksanakan selama 5 tahun (5 tahap), meliputi Tahap Persiapan, Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, Tahap Kemandirian, dan Strategi Keberlanjutan Kegiatan.

Tujuan pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Papua-Papua Barat: memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri dan tujuan khusus memberdayakan masyarakat miskin untuk mengembangkan perekonomian kawasan adat di Papua dan Papua Barat yang berbasis sosial budaya. Sasaran kegiatan adalah kawasan yang sudah terbentuk pada tahun 2013, yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang mempunyai potensi pengembangan komoditas unggulan spesifik lokal dan potensi pengembangan titik tumbuh sebagai pusat ekonomi di 23 kawasan, 8 kabupaten/kota (Jayapura, Kota Jayapura, Jayawijaya, Biak Numfor, Mimika, Waropen, Yapen Waropen, Nabire) di Provinsi Papua dan 4 kabupaten (Fak-Fak, Manokwari, Maybrat, Tambrau) di Provinsi Papua Barat. untuk pemantapan kelembagaan dan pusat ekonomi kawasan. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Papua-Papua Barat adalah pendekatan wilayah kecamatan yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat adat dengan mengikuti konsepsi adat setempat dan memiliki kesamaan ekologi, potensi sumberdaya alam, permasalahan, serta mata pencaharian, melalui: (1) identifikasi permasalahan dan pemetaan potensi wilayah; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) penguatan kelembagaan; (4) pengembangan sistem ketahanan pangan; dan (5) koordinasi lintas sektor untuk sinkronisasi dan integrasi program lintas sektor. Untuk

tahun 2015 kegiatan Kawasan Mandiri Pangan telah memasuki tahap kemandirian dan sudah tidak diberikan dana bansos lagi, kelompok harus sudah mulai mengembangkan hasil produksinya.

➤ **Perbatasan**

Tujuan umum dari kawasan perbatasan adalah memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri, Tujuan khusus mengembangkan perekonomian kawasan perbatasan antar negara. Sasaran pengelolaan kawasan mandiri pangan perbatasan adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) pada kawasan perbatasan negara di 12 provinsi pada 36 kabupaten/kota (73 kawasan). Secara rinci lokasi kawasan perbatasan yaitu: (1) Provinsi Aceh, Kota Sabang; (2) Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai; (3) Provinsi Riau: Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai; (4) Provinsi Kalimantan Barat: Kabupaten Sambas, Sanggau, Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu; (5) Provinsi Kalimantan Timur: Kabupaten Nunukan, Kutai Barat, Malinau; (6) Provinsi Sulawesi Utara: Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud; (7) Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Morotai; (8) Provinsi Maluku: Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru; (9) Provinsi Nusa Tenggara Timur: Kabupaten Alor, Rotendao, Timor Tengah Utara, Kupang, Belu; (10) Provinsi Papua: Kabupaten Keerom, Merauke, Bovendigul, Pegunungan Bintang, Supiori; (11) Provinsi Kepulauan Riau: Kabupaten Anambas, Bintan, Karimun, dan Kota Batam; (12) Provinsi Papua Barat, Kabupaten Raja Ampat.

Kegiatan pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Perbatasan merupakan kegiatan pengembangan ketahanan pangan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan di wilayah perbatasan. Rancangan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Perbatasan, dilaksanakan selama 5 tahun dalam 5 tahap, meliputi Tahap Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian, dan Strategi Keberlanjutan. Pada tiga tahap pertama (tahap persiapan, penumbuhan, dan pengembangan), paket kegiatan yang difasilitasi melalui dana APBN antara lain: pembinaan, pendampingan, dan dana bantuan sosial. Dua tahap terakhir (tahap kemandirian dan strategi keberlanjutan) peran Pusat melalui sumber dana APBN mulai dikurangi, diharapkan peran pemerintah daerah melalui dana APBD I/II terutama dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan bisa lebih dominan. Berdasarkan desain ini diharapkan akan lebih terjamin keberlanjutan pengembangan dan manfaat dari implementasi kegiatan ini.

Pengembangan kawasan perbatasan merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu kawasan yang dihuni komunitas yang mengalami berbagai permasalahan sosial dan ekonomi karena keterbatasan wilayah dan lokasi menjadi wilayah yang maju, yang komunitasnya memperoleh kesejahteraan dan kualitas hidup setara dengan komunitas masyarakat non perbatasan. Selama ini pendekatan perencanaan pengembangan kawasan perbatasan lebih banyak ditekankan pada pendekatan

keamanan (*security approach*). Namun seiring dengan perkembangan kajian-kajian tentang kawasan perbatasan bahwa kawasan perbatasan darat dan laut antar negara merupakan kawasan yang masih rentan terhadap infiltrasi ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya dari negara lain. Di sisi lain, kawasan perbatasan antar negara masih dihadapkan pada permasalahan yang sangat mendasar seperti rendahnya kesejahteraan masyarakat, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, serta minimnya infrastruktur di sektor perhubungan dan sarana kebutuhan dasar masyarakat. Ketertinggalan pembangunan kawasan perbatasan, baik darat maupun laut dengan negara tetangga secara sosial maupun ekonomi dikhawatirkan dapat menyebabkan kerawanan pangan jangka panjang. Terkait dengan pelaksanaan pengembangan kawasan mandiri pangan perbatasan, pusat perkotaan di masing-masing kecamatan yang berbatasan dengan negara tetangga adalah titik tumbuh ekonomi di kawasan perbatasan. Titik tumbuh ekonomi kawasan yang terletak di kota kecamatan tersebut. Untuk tahun 2015 kegiatan Kawasan Mandiri Pangan telah memasuki tahap kemandirian dan sudah tidak diberikan dana bansos lagi, kelompok harus sudah mulai mengembangkan hasil produksinya.

➤ **Kawasan Mandiri Pangan**

Untuk mendukung kegiatan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2015 membuat pedoman pelaksana kawasan mandiri pangan. Tujuan Khusus : kegiatan Kawasan Mandiri Pangan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin/rawan pangan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal. Tujuan Umum : untuk meningkatkan potensi pengembangan pangan yang mendukung terwujudnya swasembada pangan dan ketahanan pangan masyarakat. Sedangkan sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM) dan rumah tangga yang memiliki potensi dalam budidaya, pengolahan dan pemasaran pangan di wilayah rawan pangan pada 85 kawasan, 85 kabupaten/kota, 24 provinsi. Pelaksanaan kegiatan KMP melalui 5 tahap selama 5 tahun, yaitu (1) Tahap Persiapan difokuskan pada penguatan kapasitas individu dan kelompok, penguatan kelembagaan masyarakat dan penguatan manajemen kelembagaan masyarakat, (2) Tahap Penumbuhan difokuskan pada penumbuhan dan pengembangan usaha budidaya tanaman, pemeliharaan ternak ikan oleh kelompok, (3) Tahap Pengembangan difokuskan pada teknologi pengolahan, pengemasan dan pusat pemasaran kawasan, (4) Tahap Kemandirian difokuskan pada pemantapan kelembagaan layanan permodalan dan peningkatan kapasitas, volume, kualitas usaha budidaya pengolahan dan pemasaran, (5) Tahap Strategi Keberlanjutan difokuskan pada temu mitra usaha pemantapan pangan dan gizi masyarakat kawasan dan mitra usaha.

c. Modul Kawasan Mandiri Pangan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di 107 kawasan, 60 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi. Modul Kawasan Mandiri Pangan disiapkan tidak hanya untuk pelaksanaan TOT tapi disiapkan juga untuk petugas lapangan dan

fasilitator dalam menumbuhkan dan mengembangkan kelompok afinitas dan kelembagaan masyarakat dalam penggunaannya hendaknya dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat di masing-masing Kabupaten. Tujuan Modul ini untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan kawasan di daerah. Isi Modul Kawasan Mandiri Pangan terdiri dari : I. Pengenalan dan perubahan pola pikir, II. Pengembangan kawasan mandiri pangan. III. Penguatan kelembagaan kawasan mandiri pangan (TPD, LKK, Pendamping). IV. Penentuan kelompok dan lokasi dengan: Indeks Potensi Kawasan (IPK), Data Dasar Rumah Tangga (DDRT), Indeks Potensi Desa (IPD). V. Penyusunan rencana pembangunan wilayah kawasan (RPWK). VI. Penyusunan RUK. VII. Pengelolaa Modal Usaha. VIII. Monitoring dan evaluasi partisipatif. IX. Pelaporan.

d. Sosialisasi Kawasan Mandiri Pangan

Pertemuan Sosialisasi Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 24 Februari di Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Gd E, Lt.3 Jalan Harsosno R.M No. 3 Ragunan Jaksel. Dengan peserta dihadiri oleh petugas dari kabupaten dan provinsi sebanyak 24 provinsi khusus yang menangani kegiatan Kawasan Mandiri Pangan. Pertemuan sosialisasi ini bertujuan:a) memberikan pemahaman kepada aparat provinsi dan kabupaten/kota tentang pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan; b) memberikan pelatihan pemberdayaan kepada aparat di lapangan melalui *Training of Trainer* (TOT) dan; c) melakukan identifikasi calon lokasi desa dan kelompok melalui survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) dan Indeks Potensi Desa (IPD).

e. Apresiasi Kawasan Mandiri Pangan

Kegiatan Apresiasi Kawasan Mandiri Pangan tahun 2015 dilaksanakan dua kali pada bulan Maret 2015, dengan sasaran peserta yang berbeda pada periode pertama untuk Kawasan Mandiri Pangan Papua-Papua Barat, Kepulauan dan Perbatasan dan angkatan ke dua untuk Kawasan Mandiri Pangan baru di 85 kawasan. Tujuan Apresiasi ini adalah: a) memberikan pemahaman bagi tenaga pendamping kawasan, LKK dan FKK, dalam pengelolaan kegiatan kawasan mandiri pangan, pengelolaan pemanfaatan dana bansos dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan pengembangan usaha sesuai lokal spesifik; b) memberikan pelatihan pemberdayaan kepada petugas di lapangan mengenai pengembangan usaha dan pemasaran hasil; c) melakukan penguatan dan pengembangan dinamika serta usaha produktif kelompok, pengembangan fungsi kelembagaan, pengembangan potensi pasar, peningkatan dukungan sarana dan prasarana. Pelaksanaan kegiatan di Wisma Industri Bogor peserta yang mengikuti pelatihan oleh petugas pendamping/penyuluh pertanian, Forum Komunikasi Kawasan (FKK) dan aparat dari Provinsi dan Kabupaten. Dari hasil Apresiasi dihasilkan kesepakatan salah satunya kegiatan usaha kelompok diarahkan untuk usaha-usaha produktif *on farm* (pertanian, peternakan, perikanan) dan *off farm* melalui kegiatan pertanian

berkelanjutan yang mendukung terwujudnya kawasan mandiri pangan, antara lain: (1) mengelola lahan yang sehat, (2) mengusahakan ketersediaan air sepanjang tahun, (3) mengoptimalkan dan memanfaatkan lahan terlantar di desa, (4) mengembangkan benih dan indukan unggul di desa, (5) mengolah limbah pertanian, (6) mengembangkan pasar dan jejaring usaha, (7) mengusahakan adanya cadangan pangan setiap kawasan (lumbung pangan hidup berupa komoditas pertanian, peternakan dan perikanan dan hasil olahannya), (8) menciptakan sektor-sektor usaha kecil dan perbaikan lingkungan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, (9) memanfaatkan limbah untuk mendukung perekonomian dan pendapatan masyarakat dan kegiatan usaha kelompok mengarah ke bentuk cluster usaha. Cluster usaha merupakan kumpulan kegiatan usaha sejenis yang saling berinteraksi dan saling ketergantungan dari sektor hulu sampai hilir. Tahapan dalam pengembangan *cluster*, yaitu: (1) memahami potensi pengembangan ekonomi kawasan; (2) menjalin kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah antar produk (*value chain*); (3) mengelola dan meningkatkan pelayanan; (4) mendorong inovasi dan kewirausahaan; (5) mengembangkan pemasaran hasil produksi kawasan.

f. Pertemuan Penyusunan Index Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2015

Dilaksanakan pada tanggal 18 - 20 Mei 2015 di Grand Cempaka Jalan Raya Puncak Km. 17 Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini bertujuan: (1) memberikan pemahaman kepada aparat provinsi dan kabupaten/kota tentang pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan; (2) memberikan pelatihan pemberdayaan kepada aparat di lapangan melalui *Training of Trainer* (TOT) dan; (3) melakukan identifikasi calon lokasi desa dan kelompok melalui survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT). Beberapa hal yang di sampaikan dalam pertemuan ini adalah : a) Provinsi dan Kabupaten akan menindaklanjuti dengan melakukan DDRT, b) Kabupaten menumbuhkan Forum Komunikasi Kawasan (FKK), Lembaga Keuangan Kawasan (LKK) dan menyusun Rencana Pembangunan Wilayah Kawasan (RPWK) berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan, serta mengirimkan hasil DDRT kepada Provinsi ditembuskan ke Pusat, c) untuk memaksimalkan peran pendamping kawasan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, dana penguatan kapasitas di kawasan dikelola oleh pendamping melalui mekanisme kontrak kerja antara PPK dengan pendamping, d) mengingat keterbatasan anggaran, penentuan kecamatan/kawasan disesuaikan dengan kondisi aksesibilitas yang dekat dengan kabupaten/kota, e) bansos yang dicairkan oleh salah satu rekening kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai pelaksana kawasan dimanfaatkan oleh 5 desa/kampung yang sudah diverifikasi oleh FKK dan pendamping kawasan.

g. Wokshop Akhir Desa Mandiri Pangan dan Kawasan Mandiri Pangan

Workshop Akhir diselenggarakan di Balai Besar Peternakan Songgoriti, Malang, pada tanggal 19 - 21 November 2015. Peserta terdiri dari eselon III/IV dari 31 provinsi dan perwakilan kabupaten/kota. Beberapa hal yang disampaikan dalam workshop

ini sebagai acuan provinsi dan kabupaten dalam melaksanakan kegiatan Desa Mandiri Pangan dan Kawasan Mandiri Pangan. Hasil rumusan yang harus dilaksanakan oleh daerah untuk Desa Mandiri Pangan dan Kawasan Mandiri Pangan adalah :

Desa Mandiri Pangan

BKP Provinsi dan Kabupaten/Kota melanjutkan pembinaan melalui dana APBD I/II dalam hal :

- a) Melanjutkan, mengembangkan dan memperluas manfaat Desa Mapan,
- b) Menerbitkan regulasi melalui Peraturan gubernur dan Bupati/Walikota untuk pengembangan usaha,
- c) Merevitalisasi kelembagaan Desa Mapan (LKD,TPD dan Kelompok) atas arahan dan bimbingan Badan atau Lembaga yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota. Khusus untuk LKD diarahkan menjadi lembaga keuangan berbadan hukum. Membentuk asosisasi LKD dalam upaya memperluas jaringan usaha dan produk unggulan desa mapan,
- d) Perlu disusun strategi pengembangan usaha kelompok Desa Mapan dengan pendekatan kluster usaha dari hulu sampai hilir dengan dukungan APBD Provinsi, dan Kabupaten/Kota,
- e) Mendorong keberlanjutan Desa Mapan dengan memberikan fasilitasi pendampingan dengan melibatkan Kepala Desa atau penyuluh setempat sesuai wilayah binaannya. Mensinergikan dan mengintegrasikan kegiatan Desa Mapan dengan lintas sektor terkait.

Kawasan Mandiri Pangan

- a) Penguatan kapasitas petugas FKK, LKK dan kelompok usaha,
- b) Mengarahkan LKK mempunyai legalitas hukum,
- c) Membangun kemitraan melalui kerjasama dengan lintas sector terkait, CSR, maupun swasta utk kegiatan on farm, off farm. Mengadakan temu usaha antara kelompok dg pengusaha,
- d) Dana bantuan pemerintah (Bapem) masuk ke rekening kelompok, kemudian ditransfer rekening ke LKK melalui berita acara serah terima dari kelompok kepada pengelola LKK untuk kawasan tahap penumbuhan.
- e) Mekanisme Pencairan Bapem: PPK membuat kesepakatan dengan kelompok, Kelompok membuat RUK yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan pendamping, yang sebelumnya diverifikasi oleh FKK dan LKK, Permohonan pencairan dan pemanfaatan dana kepada kelompok melalui LKK yang diketahui oleh pendamping, disertai : (1) Proposal T-1; (2) RUK; (3) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PPK dengan Kelompok bermetrai Rp. 6000; (4) Surat kesanggupan melaksanakan pekerjaan oleh penyuluh dan kelompok; (5) Berita acara serah terima bantuan pemerintah antara PPK dengan kelompok yang

diketahui Kepala Badan dan bermetari Rp 6000 dilampiri KTP ketua dan bendahara kelompok; (6) Rekening Bank; (7) Susunan organisasi dan anggota; diketahui kepala desa dan pendamping; (8) SK Bupati penetapan kawasan; (9) SK kepala badan/kantor tentang penumbuhan kelompok; (10) Pakta integritas.

3.2. Pelaksanaan Kegiatan Di Daerah

1. Kawasan Mandiri Pangan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pengembangan diarahkan untuk peningkatan kapasitas individu, kelompok dan kelembagaan, pengembangan usaha produktif dalam rangka penguatan sistem ketahanan pangan, koordinasi dan sinkronisasi dan integrasi lintas sektor dalam rangka dukungan penyediaan pemasaran dan penguatan permodalan kawasan. Pada tahun 2015 masih diberikan dana bansos pada tahap ketiga perkembangan dana penyaluran dana bansos berdasarkan RUK (Rencana Usaha Kerja) kelompok dapat dilihat di bawah ini ada beberapa Provinsi yang menyampaikan laporan ke Pusat. Besarnya dana bansos yang disalurkan di kelompok sebanyak Rp.....

2. Kawasan Mandiri Pangan Baru (Tahun 2015)

Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan melalui : (1) identifikasi permasalahan dan pemetaan potensi sumberdaya, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) penguatan kelembagaan untuk mendukung sistem ketahanan pangan di kawasan, dan (4) koordinasi untuk sinkronisasi dan integrasi program lintas sektor dan sub sektor. Rancangan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan selama 5 tahap (5 tahun), meliputi Tahap Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian, dan Keberlanjutan program. Pada tahap persiapan belum dialokasikan dana bansos, setelah disusun Rencana Pembangunan Wilayah Kawasan (RPWK) dan usulan RUK Kelompok akan dialokasikan bansos pada tahap penumbuhan (tahun II) untuk peningkatan produksi, tahap pengembangan (tahun III) untuk pengolahan dan tahap kemandirian (tahun IV) untuk pengembangan pasar. Kawasan Mandiri Pangan tahun 2015 85 kawasan harus melakukan DDRT untuk menetapkan lokasi kawasan dari laporan daerah ada beberapa provinsi dan kabupaten yang telah menyampaikan laporan DDRT ke pusat. Di bawah ini kami sampaikan data lokasi kawasan dan rencana usaha yang telah di lakukan di kawasan baru 60 % provinsi atau kabupaten yang telah melaporkan ke pusat.

BAB. IV. PERMASALAHAN DAN PENUTUP

1. Permasalahan

No	Provinsi	Permasalahan	Upaya pemecahan
1	Aceh	<ul style="list-style-type: none">• Kurangnya Pemahaman tentang tugas dan fungsi baik dari Petugas Kabupaten, Pendamping, Forum Komunikasi Kawasan (FKK), Lembaga Keuangan Kawasan (LKK) dan kelompok afinitas. Sehingga belum optimal menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penggerak pembangunan Ketahanan Pangan di Desa.• Terlambatnya pencairan dana bansos, melewati batas akhir pencairan 31 Juli 2014. Sehingga berimbas terhadap pengembangan modal ke kelompok (revolving) karena pengembalian modalnya tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu satu tahun karena usahanya belum menghasilkan produksi.• Belum optimalnya pengembalian pinjaman dana pada tahun kedua oleh anggota kelompok, padahal sudah ada sanksi yang sangat tegas terhadap pelanggaran kesepakatan peminjaman dana kawasan oleh masing-masing anggota kelompok.• Kelompok Afinitas yang telah dibentuk belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan seperti administrasi tidak tertib, pertemuan kelompok belum dilakukan secara rutin dan aturan-aturan dalam kelompok tidak dibuat secara jelas.• Dukungan lintas sektor khususnya dalam pembangunan fisik (infrastruktur dan sarana prasarana) seperti pembangunan jalan desa/jalan usahatani, pengairan sarana air minum kesehatan masih terbatas.• Lembaga Keuangan Kawasan (LKK) yang sudah terbentuk belum berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro di	<ul style="list-style-type: none">• Terus melakukan Pelatihan bagi pendamping, FKK dan LKK khususnya dalam pengelolaan administrasi kelompok dan penyusunan rencana usaha telah dilakukan di tingkat Provinsi dan diharapkan Pendamping dan FKK menindaklanjuti pelatihan ditingkat kelompok.• FKK dan LKK perlu dilakukan pelatihan khusus untuk memberikan pemahaman tentang pembangunan sistem ketahanan pangan di pedesaan.• FKK, LKK dan pendamping perlu bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan kelompok afinitas dalam membuat rencana pembangunan desa secara partisipatif dalam penetapan prioritas pembangunan desa secara bertahap dan berkelanjutan.• Perlu diadakan rapat koordinasi secara rutin melalui Dewan Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program lintas sektor dari dinas Kabupaten/Kota untuk mendukung program Kawasan Mandiri Pangan minimal setiap triwulan.• Kelompok Afinitas,

pedesaan. Modal yang dikelola masih sangat terbatas hanya mengandalkan dana PMUK sebesar Rp. 200.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang diputar oleh kelompok. Belum ada modal tambahan yang diperoleh dari sumber lain karena LKK yang dibentuk belum berbadan hukum sehingga sulit untuk mengakses modal dari koperasi atau pinjaman dari Bank.

- Pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis relatif masih kurang dilakukan ditingkat kelompok sehingga kemampuan anggota kelompok dalam menyusun rencana usaha sesuai potensi yang dimiliki maupun dalam menjalankan usaha masih relatif rendah.
- Pendamping belum mampu membimbing masyarakat/kelompok dalam menumbuhkan usaha-usaha baru di desa sesuai potensi yang dimiliki.
- Koordinasi antara pendamping dan FKK dalam membimbing masyarakat membangun ketahanan pangan khususnya dalam mencari sumber dana untuk menunjang permodalan kelompok dan mencari kegiatan dari lintas sektor masih sangat lemah.
- Usaha-usaha yang dibangun oleh kelompok masih bersifat individu karena anggota kelompok relatif belum mengerti tujuan dan manfaat berkelompok.

Pendamping, FKK dan pengurus LKK perlu secara rutin melakukan pertemuan 2 bulan sekali untuk membahas permasalahan dan kegiatan usaha yang akan dilakukan.

- Pembinaan dan pelatihan di tingkat kelompok lebih intensif dilakukan baik dari tingkat Provinsi dan Kabupaten dan pendamping tinggal di lokasi sehingga setiap saat dapat berhubungan dengan kelompok.
- LKK yang sudah terbentuk perlu diusahakan berbadan hukum agar dapat mengakses permodalan dari Bank atau Koperasi/Lembaga keuangan lainnya.
- Peraturan kelompok yang sudah disepakati agar konsisten dijalankan oleh anggota bila mana ada pelanggaran harus sanksinya.
- Pengumpulan dan analisis data hasil DDRT dan SRT perlu dilakukan secara baik sesuai potensi/gambaran karakteristik rumah tangga.
- Pembinaan yang intensif kepada kelompok perlu terus diupayakan oleh kabupaten/Kota dan Provinsi untuk memberikan pemahaman program Kawasan Mandiri Pangan. Tujuan kelompok dibentuk untuk melakukan pertemuan secara berkala sekali sebulan

2 Sumatera Utara

Kab. Deli Serdang

- Tidak berkembang dari dana yang dikururkan dibelanjakan 2400 ekor tidak memperhitungkan lokasi dengan baik, walaupun pakan melimpah tapi karena suhu yang sangat panas sebagian itik mati
- Kelompok yang dinilai masih gagal

Kab. Deli Serdang

- Untuk tahun depan ganti dengan komoditi lain yang lebih memberi manfaat bagi anggota kelompok
- Diterima tim teknis kabupaten dan hasil remuk dengan KPA dan tim

	<p>namun memungkinkan untuk diganti komoditi masih dapat untuk dicoba sekali lain</p>	<p>lainnya</p>
<p>3 Riau</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan paradigma pola pikir dari hanya beternak ke arah yang lebih bersifat bisnis dengan beternak sapi potong sistem penggemukan • Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, terutama terhadap dukungan jalan yang menghubungkan dari satu desa ke desa lainnya yang kurang memadai, sehingga memerlukan waktu tempuh yang cukup lama dan sulit dilalui pada waktu musim hujan tiba serta terbatasnya jaringan listrik, termasuk dalam penyampaian laporan perkembangan kegiatan dari kelompok/pendamping ke Kabupaten dan Provinsi. • Belum terbentuknya pasar desa sebagai pusat transaksi dan penjualan produk dari hasil produksi-usaha yang dilakukan masyarakat di kawasan perbatasan. • Terbatasnya arus informasi, baik melalui media cetak maupun jaringan telekomunikasi, termasuk jaringan handphone serta internet. • Jarak desa pada masing-masing kelompok kawasan mandiri pangan perbatasan antara satu dengan yang lainnya cukup berjauhan dan kadangkala dipengaruhi oleh musim gelombang/ angin yang cukup kencang, sehingga menyulitkan dalam pengembalian dana pinjaman ke Lembaga Keuangan Kawasan dalam waktu yang singkat dan cepat. • Masih kurangnya pemahaman sebagian pendamping terhadap program dan pengelolaan kawasan mandiri pangan perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatasi permasalahan antara lain melalui sinkronisasi dan Musyawarah Rencana Pembangunan di Provinsi Riau bersama instansi ditingkat Provinsi dan kabupaten/kota. • Perlunya meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara jalan-jalan di desa. • Perlunya meningkatkan pelatihan administrasi dan teknis dalam bidang pertanian secara umum dan pengolahan pangan lokal secara mekanisasi kepala kelompok binaan. • Perlunya meningkatkan pembangunan jaringan informasi dari pihak terkait.
<p>4 Bangka Belitung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi masyarakat penerima manfaat program, membangun persepsi masyarakat termasuk kelembagaan yang sudah dibentuk (FKK, kelompok afinitas, LKK) terhadap program mandiri pangan kawasan ini memerlukan waktu dan proses yang berkelanjutan. Persepsi masyarakat bahwa bansos adalah bantuan yang tidak perlu dikembalikan menjadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat dengan menegaskan bahwa program ini berbasis pemberdayaan masyarakat dengan bantuan yang diberikan dalam bentuk penguatan modal usaha kelompok (PMUK) • Perlu peningkatan

mindset yang tertanam kuat. Terlebih masyarakat dengan latar belakang yang plural memberikan tantangan tersendiri untuk proses internalisasi program dalam rangka membangun kesepahaman

- Rangkaian kegiatan dalam penumbuhan program ini dihadapkan dengan pendanaan yang minim. Mulai dari pelatihan teknis baik administrasi maupun pengelolaan usaha produktif sampai dengan pembinaan. Hal ini sangat mempengaruhi efektifitas kegiatan yang berdampak pada output database yang kurang maksimal
- Sumber daya manusia yang terbatas, petugas yang menangani analisis ketersediaan pangan dan juga sebagai petugas dalam pelaksanaan kegiatan distribusi dan konsumsi. Hal ini sangat tidak kondusif dalam pelaksanaan program yang membutuhkan mobilitas dan konsentrasi yang maksimal. Akibatnya berdampak pada optimalisasi pelaksanaan tahapan program seperti database sosialisasi, pembinaan dan administrasi program

anggaran APBN dan dukungan APBD dalam memperkuat operasionalisasi program pada tahapan selanjutnya

- Pentingnya spesifikasi tugas pembina/pengelola yang khusus menangani program. Kemudian penambahan personil juga menjadi kebutuhan mendesak untuk diatasi dalam memperkuat penanganan proram ini kedepan.

5 Kepulauan Riau

a. Bintan

- Kurangnya pemahaman tentang pengisian formulir DDRT dan SRT yang telah di tugaskan kepada tenaga pendamping.
- Tidak adanya kerjasama / koordinasi yang baik antara tenaga pendamping dengan tim pangan desa untuk tingkat proses penyaluran dana usaha kelompok yang dikuasakan penuh pada desa bersangkutan.
- Terlambatnya proses administrasi pencairan dana sosial dan penggunaan serta pemanfaat dana sosial harus melewati Lembaga Keunagan Desa yang dibentuk.
- Kurang disiplinnya laporan kegiatan dari pendamping ke tingkat Kabupaten dan Provinsi.
- Terjadinya peralihan dari tugas pembantuan(TP) ke Dana Dekonsentrasi (Dekon) yang segala administrasinya melalui provinsi.

a. Bintan

- Pemberiaan pelatihan khusus tenaga pendamping yang di tugaskan mengisi formulir DDRT dan SRT.
- Pembinaan materi untuk pengelolaan dan pengaturan sistem kerja yang baik dengan Tim pendamping, Tim Pangan Desa serta Tim Teknis Pokja secara lintas sektoral.
- Pembentukan Lembaga Keunagan Desa untuk pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan dana sosial desa.
- Memotifasi Pendamping untuk Menyampaikan laporan ke kabupaten sehingga laporan Kab. Ke Provinsi dan pusat tidak terlambat.
- Mengembalikan Tugas

Pembantuan (TP) ke Kabupaten sehingga semua Administrasi di tangani langsung di Kabupaten.

- 6 Kalimantan Barat
- a. Prop. Kalimantan Barat
- Belum adanya pemahaman tentang Rencana Pengembangan Wilayah Kawasan
 - Buruknya kondisi infrastruktur jalan dan sarana transportasi ke lokasi kawasan, terutama jalur yang menghubungkan ke pusat ekonomi kecamatan atau kabupaten. Akses penduduk ke pusat ekonomi negara tetangga yang lebih baik dibandingkan ke pusat ekonomi kecamatan atau kabupaten mempengaruhi pola ekonomi dan konsumsi masyarakat di kawasan perbatasan.
 - Rendahnya ketersediaan sarana/prasarana umum seperti sekolah dan pusat layanan kesehatan, serta rendahnya ketersediaan air bersih yang layak.
 - Rendahnya kemampuan teknis dan keterampilan pemanfaat dalam mengembangkan aktivitas usaha;
 - Kurangnya infrastruktur irigasi dan sarana/prasarana produksi untuk mendukung aktivitas usaha tani kelompok;
 - Usaha yang dilakukan adalah jenis usaha dengan investasi jangka panjang, sehingga perputaran atau perguliran bansos tidak berjalan lancar;
 - Jarak tempuh antar desa yang jauh atau akses yang buruk ke desa yang tergabung dalam kawasan, sehingga menyulitkan koordinasi antar anggota Kelompok Afinitas.
 - Belum terlatihnya pengurus FKK dan LKK dalam mengelola kelompok, sehingga menyebabkan lemahnya pencatatan aktivitas kelompok.
 - Rendahnya akses kelompok terhadap fasilitas pembangunan, terutama lembaga keuangan pemerintah.
 - Pemasaran hasil produksi atau budidaya pertanian/peternakan sangat sulit, sehingga kegiatan usaha hanya
- a. Prop. Kalimantan Barat
- b. Sintang
- Koordinasi dengan instansi teknis terkait guna kelancaran sarana dan prasarana masyarakat
 - Pembinaan dan sosialisasi di tingkatkan
 - Dilakukan sosialisasi dan pendekatan untuk mengajak memahami program ketahanan pangan
 - Memberi gambaran dan pemahaman maksud dan tujuan dana bansos yang berhak menerimanya

dapat dilakukan dalam skala kecil untuk memenuhi kebutuhan lokal kawasan/desa.

b. Sintang

- Akses jalan menuju desa perbatasan sangat rusak dan sarana dan prasarana sangat terbatas
 - Tidak adanya lahan sawah khususnya kawasan mandiri pangan
 - Pemahaman akan kawasan mandiri pangan masih sangat kurang
 - Sulitnya merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan dari rumah tangga sampai dengan tingkat individu
- 7 Sulawesi Utara
- Dalam kelompok ada anggota yang tidak ada kebersamaan/kerja sama kelompok dalam berkegiatan sehingga ada anggota yang mengeluh dengan ketidak aktifan anggota yang lain. Untuk itu dalam pertemuan kelompok sering ditekankan lagi tentang kerjasama anggota agar kelompok berjalan dengan baik dan diberikan pemahaman tentang hasil yang akan anggota dapatkan
 - Tidak ada keterbukaan pengurus kelompok dalam pengelolaan keuangan kelompok terutama pembelanjaan karena belum adanya laporan keuangan dari hasil pembelanjaan, secepatnya agar diadakan pertemuan kelompok untuk dilaporkan hasil pembelanjaan
 - Pengembalian pinjaman yang agak terlambat karena hasil dari kelompok yang kurang memuaskan karena berbagai masalah yang timbul seperti untuk peternakan ayam daging yang mengalami gagal panen karena ayam banyak yang mati
 - Untuk penanaman Tanaman Pangan dan hortikultura yang sekarang ini masih belum terlaksana karena masalah musim kemarau yang berkepanjangan sehingga penanaman di tunda.
 - Untuk kegiatan yang ada di Kecamatan Nusa Tabuka belum berjalan
- Perlu pengembangan kuantitas dan kualitas SDM pengurus LKK, kelompok, penyuluh dalam pengelolaan dana
 - Perlu adanya kegiatan magang bagi kelompok dan pengembangan teknologi bagi masyarakat petani/nelayan dan kelompok penerima bantuan
 - Fungsi pendamping sangat penting untuk memfasilitasi koordinasi antar kelembagaan yang ada di kampung dalam membangun kawasan mandiri pangan di kecamatan

sebagaimana yang diharapkan karena pengurus LKK maupun pengurus kelompok penerima bantuan belum memahami tugas dan tanggungjawab dari masing-masing pengurus

- Dana kegiatan persiapan maupun penumbuhan belum sepenuhnya terserap masih ada dalam rekening LKK kecamatan

8 NTT

a. Provinsi NTT

- Pemanfaatan dana belum berkesinambungan karena lebih diprioritaskan pada usaha budidaya dan belum terdapat kelompok pengolahan hasil untuk mengolah hasil budidaya kelompok.
- Sampai dengan Tahap Pengembangan (Tahun 2015) pelaksanaan kegiatan usaha produktif kelompok melalui Program Kawasan Mandiri Pangan mulai memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam meningkatkan modal kelompok dan modal Lembaga Keuangan Kawasan (LKK).
- Belum tersusunnya AD/ART kelompok dan AD/ART LKK di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Kupang menjadi acuan terhadap sanksi atas keterlambatan pengembalian pinjaman bansos Kawasan Mandiri Pangan Tahap I (Tahun Anggaran 2013).
- Pendampingan oleh penyuluh tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan dikarenakan terdapat kewajiban dan tugas rutin lainnya yang harus dilaksanakan oleh penyuluh seperti penyuluhan dan pendampingan terhadap program lain.
- Kurangnya dukungan pendanaan program di tingkat Kabupaten dan Provinsi untuk mengoptimalkan kegiatan ini di lapangan yaitu untuk pembinaan, pendampingan, pelatihan, monitoring dan evaluasi dan lain-lain.

b. Kab. Belu

- Pengembalian dana pinjaman tahap persiapan yang beredar di anggota kelompok belum sepenuhnya dikembalikan
- Pengurus FKK masih kurang aktif dan

a. Provinsi NTT

- Pembinaan secara kontinyu oleh Kabupaten dan pendamping untuk meningkatkan klasifikasi Kawasan dan desa menjadi Klasifikasi Tinggi (KT) sesuai tahapan yang dilaksanakan agar efektifitas Program/Kegiatan dapat tercapai.
- Percepatan pemanfaatan Bansos Tahap II (T.A. 2014) dan Tahap III (T.A. 2015) agar diperoleh efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- Melakukan pembinaan dan pendampingan secara terus menerus.

b. Kab. Belu

- Melakukan pendekatan kepada pengurus LKK agar dapat menghimbau dan mempercepat penarikan pinjaman yang beredar di anggota kelompok
- Melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Perbatasan
- Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang dari Kabupaten ke Desa
- Terus melakukan advokasi pada institusi perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pembiayaan Kawasan MP perbatasan

- kurang memahami tugasnya
- Dukungan anggaran APBD kabupaten belum ada untuk menunjang kegiatan pada setiap tahapan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab kabupaten pelaksana
- Pengurus Lembaga Keuangan Kawasan masih kurang memahami tugasnya sehingga belum berjalan optimal
- Penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan kawasan mandiri pangan perbatasan dari Kabupaten ke Provinsi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan yaitu laporan 3 bulanan, laporan semester dan laporan tahunan melalui APBD I dan APBD II
- Terus memberikan pedoman/petunjuk/surat ke Desa untuk mengingatkan sekaligus menegaskan proses dan penyampaian laporan perkembangan sesuai ketentuan
- Memberikan pelatihan terhadap petugas yang baru
- Pelatihan teknis terhadap pendamping, pengurus LKK dan FKK serta kelompok-kelompok afinitas/kelompok usaha terus di tingkatkan.

9 Maluku

- a. Prop. Maluku
- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait usaha-usaha produksi yang dapat dilakukan di tingkat kawasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pangan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan
 - Masih terbatasnya kemampuan SDM khususnya pendamping serta pelaksana kegiatan dalam mengelola kegiatan
 - Terbatasnya pembiayaan terkait pendamping kegiatan
 - Luasnya wilayah menyebabkan koordinasi masing-masing kawasan menjadi terganggu
 - Usaha pertanian masih dilakukan pada usaha kecil dan belum berorientasi pada pasar dan di pengaruhi iklim
 - Semangat kerja dan kewirausahaan yang masih rendah dari anggota kelompok
- b. Maluku Tenggara
- Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Modal Untuk Usaha Produktif Masyarakat Tani Pada Kawasan “
 - Terbatasnya SDM di LKK, FKK, dan Kleompok
 - Lemahnya kelembagaan kawasan
 - Terbatasnya sarana dan prasarana
- c. Kota Tual
- Pangan Desa FKK dalam pendampingan kelompok sesuai
- a. Prop. Maluku
- Perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan agar tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai dengan baik, khususnya peningkatan usaha masyarakat
 - Penyediaan dana oleh pemerintah pusat dan daerah secara berkelanjutan
 - Penyiapan sarana transportasi dan komunikasi antar desa dalam kawasan mandiri pangan
 - Melakukan konsolidasi secara terus menerus kepada pendamping kegiatan
 - Dilakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu kepada kelompok tani agar dapat merubah pola pikir petani untuk berorientasi pada pengembangan usaha dan pemasaran
- b. Maluku Tenggara
- Tercapainya Peningkatan Sumber Daya FKK, LKK dan Petani
 - Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengembangan Usaha Produktif secara kontinu
 - Melaksanakan pendampingan yang intensif pada FKK, LKK dan

- dengan tugas dan fungsi.
 - Masih rendahnya pemahaman anggota kelompok tentang pemanfaatan kegiatan demapan dan kawasan Mapan Kepulauan.
- kelompok tani Kawasan mandiri pangan kepulauan Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait dibidang pemberdayaan
- c. Kota Tual
- Perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan dan pelatihan bagi Tim Pangan, FKK dan LKD, LKK.
- 10 Maluku Utara
- Masih ada dana sebesar lima puluh juta yang belum dimanfaatkan oleh kelompok di kawasan Morotai Timur
 - Aktifitas Forum Kounikasi Kawasan (FKK), Lembaga Keuangan Kawasan (LKK) dan kelompok afinitas belum optimal
 - Belu ada perjanjian antara lembaga keuangan kawasan dengan kelompok tentang tata cara pengembalian pinjaman
 - Masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan Forum komunikasi Kawasan (FKK),Lembaga Keuanngan Kawasan (LKK)
 - Koordinasi lintas sektor yang belum optimal
 - Dukungan dana APBD I dan II yang terbatas
- Diperlukan penguatan peran tenaga pendamping dalam memberdayakan FKK, LKK dan kelompok afinitas
 - Membuat perjanjian tentang tata cara pengembalian dan sanksi bila tidak dikembalikan
 - Perlu dilaksanakannya peningkatan kapasitas bagi Forum Komunikasi Kawasan dan Lembaga Keuangan Kawasan
 - Perlu sosialisasi kepada tim koordnasi teknis untuk berperan aktif dalam pemberdayaan asyarakat
 - Perlu peningkatan dukungan APBD I dan II
- 11 Papua Barat
- Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan belum dilakukan secara baik oleh aparat di daerah sehingga masih belum di mengerti oleh masyarakat/petani.
 - Pendampingan dan pelatihan mengenai upaya penyediaan pangan, proses produksi atau bercocok tanam yang benar, pemasaran, pembentukan harga jual, dan administrasi keuangan perlu dilakukan secara terus menerus;
 - Pola pikir (mindset) masyarakat/petani sasaran masih terpaku pada program lain yang pemanfaatan dananya bersifat dana pakai habis (hibah);
 - Belum adanya kesesuaian/kekompakan dalam masyarakat untuk menentukan jenis usaha untuk dikelola secara berkelompok.
 - Berat untuk merubah pola usahatani masyarakat lokal papua dari konsumtif
- Hanya dengan tersedianya dana APBN, APBD dan sumber dana lainnya serta pendampingan secara terus menerus oleh semua pihak maka kegiatan kawasan mandiri pangan atau kegiatan lain berupa pemberdayaan pada masyarakat dapat berhasil dilaksanakan di masyarakat

- 12 Papua
- dan diarahkan ke pola wirausaha
- a. Merauke:
- Baru terbentuknya Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Kehutanan di Kabupaten Merauke pada bulan April 2014, sehingga segala administrasi kegiatan terhambat dan perlu penyesuaian di tingkat lokasi/kampung/ kawasan, kabupaten dan provinsi
 - Badan Ketahanan Pangan melekat pada Badan Penyuluh, sehingga dialihkan program kegiatan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Merauke sebagai pejabat pelaksana kegiatan harus di revisi di tingkat provinsi
 - Program kegiatan Mapan tahun 2014 merupakan keberlanjutan dari kawasan tahun 2013 namun disayangkan bahwa pada kawasan tersebut sudah berulang kali pembinaan kegiatan mapan dan kabupaten Merauke tidak berkewenangan untuk mengalihkan ke kawasan lainnya selain kawasan tahun 2013
 - Keterlambatan transfer dana ke rekening kelompok disebabkan Satker berada di TK. Provinsi Papua
- b. Jayawijaya
- Kurangnya adanya pemahaman yang mendalam akan bantuan sosial ini dan kegunaan serta keberlanjutan dana yang telah diberikan dalam pemikiran para anggota penerima bantuan sosial kawasan mandiri pangan bantuan yang telah diterima dapat digunakan semua tanpa adanya perkembangan modal usaha kelompok sehingga bantuan telah habis maka kegiatan pun tidak berkembang
- a. Merauke :
- Pembinaan administrasi kegiatan Mapan dan evaluasi tingkat kawasan dan kampung
 - Sosialisasi program ulang ditingkat kampung dan kawasan
 - Pelaksanaan kegiatan Mapan mengikuti Musim Tanam di Kabupaten Merauke
 - Satker Mandiri di tingkat Kabupaten Merauke, karena sudah ada KPPN di Merauke
- b. Jayawijaya
- Peningkatan sumber daya manusia peltihan kepribadian untuk meningkatkan rasa tanggung jawab serta adanya pelatihan ketrampilan dalam pengolahan pangan lokal yang lebih baik

2. Penutup

Pengembangan Desa Mandiri Pangan kegiatannya meliputi Desa Mandiri Pangan, Kawasan Mandiri Pangan Perbatasan, Kepulauan dan Papua-Papua Barat dan Kawasan Mandiri Pangan baru. Kegiatan tahun 2015 menggambarkan program kegiatan yang dilaksanakan di Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Dengan adanya laporan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan ini dapat

mengetahui perkembangan kegiatan yang dilakukan baik di Pusat maupun daerah. Kami menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan laporan yang akan datang dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Desember 2015

LAMPPIRAN

**Tabel 1: Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan TA. 2015
(Tahap Pengembangan)**

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	SP2D	KET
1	Aceh	Kota Sabang	Sukakarya	200.000.000	DK
2	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Tanjung Beringin	200.000.000	TP
			Teluk Mengkudu	200.000.000	TP
3	Riau	Bengkalis	Bukit Batu	200.000.000	TP
			Bantan	200.000.000	TP
		Kep. Meranti	Rangsang Barat	200.000.000	DK
			Rangsang Pesisir	200.000.000	DK
		Indragiri Hilir	Gaung	200.000.000	TP
			Enok	200.000.000	TP
		Rokan Hilir	Pasir Limau Kapas	200.000.000	DK
			Sinaboi	200.000.000	DK
		Dumai	Sungai Sembilan	200.000.000	DK
			Dumai Barat	200.000.000	DK
4	Babel	Bangka Tengah	Koba	200.000.000	DK
		Belitung	Sijuk	200.000.000	DK
			Badau	200.000.000	DK
		Belitung Timur	Simpang Pesak	200.000.000	DK

			Damar	200.000.000	DK
5	Kepri	Anambas	Palatak	200.000.000	DK
		Batam	Galang	200.000.000	DK
			Belakang padang	200.000.000	DK
		Bintan	Bintan Timur	200.000.000	DK
		Karimun	Tebing	200.000.000	DK
		Lingga	Singkep Pesisir	200.000.000	DK
		Natuna	Bunguran Barat	200.000.000	DK
			Bunguran Tengah	200.000.000	DK
6	Kalbar	Sanggau	Entikong	200.000.000	TP
			Sekayam	200.000.000	TP
		Kapuas Hulu	Embalon Hulu	200.000.000	DK
			Putussibau Utara	200.000.000	DK
		Sambas	Sajingan Besar	200.000.000	DK
			Galing	200.000.000	DK
		Sintang	Ketungau Hulu	200.000.000	TP
		Bengkayang	Jagoi Babang	200.000.000	TP
			Siding	200.000.000	TP
7	Kaltim	Kutai Barat	Long Hubung	200.000.000	DK
			Long Bagun	200.000.000	DK
8	Kaltara	Nunukan	Sebatik	200.000.000	DK
			Lumbis	200.000.000	DK
		Malinau	Malinau Utara	200.000.000	DK
9	Sulut	Kepulauan Talaud	Beo	200.000.000	TP
			Lirung	200.000.000	TP
		Kepulauan Sangihe	Kendahe	200.000.000	TP
			Nusa Tabukan	200.000.000	TP
10	NTT	Kupang	Amfoang Utara	200.000.000	DK
			Amfoang Timur	200.000.000	DK

		Ende	Pulau Ende	200.000.000	TP
			Maukaro	200.000.000	TP
		TTU	Bikomi Nilulat	200.000.000	TP
			Bikomi Utara	200.000.000	TP
		Sumba Timur	Kuta	200.000.000	TP
			Haharu	200.000.000	TP
		Alor	Alor Selatan	200.000.000	TP
			Alor Timur	200.000.000	TP
		Lembata	Atadai	200.000.000	TP
			Nubatukan	200.000.000	TP
		Sikka	Palue	200.000.000	TP
			Alok Timur	200.000.000	TP
		Belu	Kobalima Timur	200.000.000	TP
			Tasifeto Timur	200.000.000	TP
		Sumba Barat	Laboya Barat	200.000.000	DK
			Loli	200.000.000	DK
11	Maluku Utara	Pulau Morotai	Morotai Jaya	200.000.000	DK
			Morotai Timur	200.000.000	DK
12	Maluku	Kep. Aru	Aru Tengah Timur	200.000.000	DK
		Maluku Tenggara Barat	Selaru	200.000.000	DK
			Nirunmas	200.000.000	DK
		Maluku Tenggara	Kei Besar	200.000.000	TP
			Kei kecil	200.000.000	TP
		Maluku Barat daya	Letti	200.000.000	DK
		Kota Tual	Tayando Tam	200.000.000	DK
			Kur	200.000.000	DK
13	Papua Barat	Maybrat	Distrik Aitinyo	200.000.000	DK
			Aifat Utara	200.000.000	DK

		Tambrau	Senopi	200.000.000	DK
			Kabar	200.000.000	DK
		Manokwari	Manokwari Utara	200.000.000	DK
		Raja Ampat	Waigeo Selatan	200.000.000	DK
			Meos Mansar	200.000.000	DK
		Fak-fak	Fak-fak Barat	200.000.000	TP
			Karas	200.000.000	TP
14	Papua	Jayapura	Kaureh	200.000.000	TP
			Yapsi	200.000.000	TP
		Jayawijaya	Asolokobal	200.000.000	TP
			Piramid	200.000.000	TP
		Biak Numfor	Andey	200.000.000	DK
			Biak Timur	200.000.000	DK
		Kepulauan Yapen	Kosiwo	200.000.000	DK
			Angkaisera	200.000.000	DK
		Kota Jayapura	Muara Tami	200.000.000	DK
			Abepura	200.000.000	DK
		Bovendigoel	Waropko	200.000.000	DK
			Mindiptana	200.000.000	DK
		Supiori	Supiori Selatan	200.000.000	DK
			Kepulauan Aruri	200.000.000	DK
		Nabire	Makimi	200.000.000	TP
			Napan	200.000.000	TP
		Mimika	Agimuga	200.000.000	TP
			Mimika Baru	200.000.000	TP
		Keerom	Arso Timur	200.000.000	DK
			Waris	200.000.000	DK
		Pegunungan Bintang	Oksibil	200.000.000	DK

			Serambakon	200.000.000	DK
		Waropen	Oudate	200.000.000	DK
			Wapoga	200.000.000	DK
		Merauke	Sota	200.000.000	DK
			Noukenjerai	200.000.000	DK
	TOTAL			21.400.000.000	

**Tabel 2: Pemanfaatan Bansos Kawasan Mandiri Pangan Perbatasan TA. 2013
(Tahap Kemandirian)**

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK	KEGIATAN USAHA	PENYALUR BANSOS
1	Aceh	Kota Sabang	Sukakarya	Iboih		Budidaya Pertanian	40.000.000
				Kuta Timur		Budidaya Pertanian	40.000.000
				Paya Seunara		Budidaya Pertanian	40.000.000
				Aneuk laot		Budidaya Pertanian	40.000.000
				Kuta Barat		Budidaya Pertanian	40.000.000
2	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Tanjung Beringin	Pekan	Rejeki Bersama	Ternak Ikan lele	70.000.000
				Bagan Kuala	Mawar	Ternak Kambing	60.000.000
				Bagan Kuala (2014)	Anggrek	Ternak itik	
				Tebing Tinggi	Swadaya Karya	Ternak kambing	70.000.000
			Teluk Mengkudu	Pekan Sialang Buah	Usaha Baersama	Alat-alat pesta	50.000.000
				Pematang Kuala	Jaya	Ternak Kambing	50.000.000
				Bogak besar	Pesisir	Ternak Lembu	50.000.000
				Sialang Buah	Sahata	Alat tangkap perikanan laut	50.000.000
				Sialang Buah (2014)	Sahata	Ternak itik	
3	Riau	Bengkalis	Bukit Batu	Sepakat		Hortikultura (Pisang)	200.000.000
				Tanjung Leban			
				Bukit Kerikil			
			Bantan	Bantan Tengah		Hortikultura (Pisang)	200.000.000
				Ulu Pulau			
				Mentayan			

		Kep. Meranti	Rangsang Barat	Permai		Palawija	200.000.000
				Bakor			
				Mekar Baru			
			Rangsang Pesisir	Kayu Ara		Perkebunan, perdagangan	200.000.000
				Sonde			
				Telensung			
		Indragiri Hilir	Gaung	Sungai Baru		Pertanian, peternakan, Nelayan,	200.000.000
				Gerambang			
				Soren			
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK	KEGIATAN USAHA	PENYALUR BANSOS
			Enok	Jaya Bakti		Perkebunan, perdagangan,	200.000.000
				Pusaran			
				Sungai ambat			
		Rokan Hilir	Pasir Limau Kapas	Panipahan Darat		Gerobak bakso	200.000.000
				Panipahan laut			
				Teluk Pulai			
			Sinaboi	Sinaboi		Gerobak sosis dan olahan	200.000.000
				Darussalam			
				Sungai Nyamuk			
		Dumai	Sungai Sembilan	Bangsai Aceh			200.000.000
				Lubuk gaung			
				Basilan batu			
				Batu tritip			
			Dumai Barat	Purnama			200.000.000
				Pangkalan sesai			
				STDI			
4	Kepri	Anambas	Palatak	Putih			200.000.000
				Belibak			
				Payamaram			
		Batam	Bulang Lintang	Kel. Setokok			200.000.000
				Kel. Bulang Lintang			
				Kel. Temoyong			
				Pantai Gelam			
				Kel. Pulau Bulu			
			Belakang padang	Kel. Pecung			200.000.000
				Kel. Pulau Terong			

				Kel. Kasu			
				Kel. Pemping			
				Kel. Sekanak			
		Bintan	Bintan Timur	Gunung Lengkuas			200.000.000
				Sungai Lekop			
				Sungai Enam			
		Karimun	Tebing	Kel.Teluk Uma			200.000.000
				Kel.Pamak			
				Kel. Harjosari			
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK	KEGIATAN USAHA	PENYALUR BANSOS
5	Kalbar	Sanggau	Entikong	Semanget		Budidaya lada, SP	40.000.000
				Nekan		Budidaya ayam buras	40.000.000
				Entikong		Budidaya padi sawah	40.000.000
				Suluh Tembawang			40.000.000
				Pala Pasang			40.000.000
			Sekayam	Pegadang		Budidaya Pertanian	200.000.000
				Kanaman			
				Bungkan			
				Raut Muara			
				Engkahan			
		Kapuas Hulu	Embalon Hulu	Tamao	Kerangkang Mapang	- Budidaya Pertanian	200.000.000
				Benua Martinus			
				Pulau Manak			
			Putussibau Utara	Nang Nyabau	Makasak Mapang	- Budidaya Pertanian	200.000.000
				Seluan			
				Sei Uluk Palin			
		Sambas	Sajingan Besar	Kaliau	Kalian Perkasa		200.000.000
				Sebunga			
				Senatap			
			Galing	Sijang	Tiga serumpun		200.000.000
				Sungai palah			
				Saga			
		Sintang	Ketungau Hulu	Empunak Tapang Keladan	Mahkota Mandiri	Perikanan, peternakan dan horti	200.000.000
				Muakan			
				Sungai Seria			

		Bengkayang	Jagoi Babang	Sekida	Baki Permata	Budidaya beras merah	200.000.000
				Jagoi			
				Gresik			
			Siding	Hli Buei	Maju Samiah	Budidaya tanaman Jahe	200.000.000
				Tangguh		Budidaya tanaman terung asam	
				Siding		Perikanan	
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK	KEGIATAN USAHA	PENYALUR BANSOS
6	Kaltim	Kutai Barat	Long Hubung	Mamahak Teboq			
			Long Bagun	Batoq Kelo			
		Nunukan	Sebatik	Binalawan			
			Lumbis	Mansalong			
		Malinau	Malinau Utara	Desa Putat			
7	Sulut	Kepulauan Talaud	Beo	Bantik		Budidaya tanaman Hortikultura	200.000.000
				Beo		Peternakan itik	
				Bantik lama		Peternakan babi	
				Beo timur	Kel. Beo Timur	Budidaya tanaman hortikultura	
			Lirung	Lirung	Hilamunan	Peternakan babi dan itik	
				Lirung I	Seruni	Penangkapan ikan	
				Lirung Matane	Nalun	Peternakan ayam daging	
				Sereh I	Mekar	Kacang tanah, singkong	
		Kepulauan Sangihe	Kendahe	Kendahe II		Pertanian	68.000.000
				Pempalareng			66.000.000
				Mohong Sawang			66.000.000
			Nusa Tabukan	Nusa		Pertanian	34.000.000
				Nanusa			33.000.000
				Bukide			33.000.000
8	NTT	Kupang	Amfoang Utara	Fatunaus	Mekar Indah	Jual beli madu, asam, jagung, SP	36.000.000
				Kolabe	Binoni Mafutus	Jual beli madu, asam, jagung, SP	36.000.000
				Lilmus	Berkat	Jual beli madu, asam, jagung, SP	36.000.000
				Afoan	Tersanjung		36.000.000
				Kelurahan Naikulu	Lohetven		36.000.000

			Amfoang Timur	Nunuanah	Bilitang Timuruan (Bitiluan)	Ternak Sapi	36.000.000
				Netemnanu Selatan	Amfoni II		36.000.000
				Kifu	Oel Upun	Ternak sapi	36.000.000
				Netemnanu Utara	Bimanat		36.000.000
				Netemnanu	Bimoni		36.000.000
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK	KEGIATAN USAHA	PENYALUR BANSOS
		TTU	Bikomi Nilulat	Tubu	Bi'ase	Babi, penggemukan babi	36.000.000
				Nilulat	Nekmese Hautunis	Penggemukan babi	36.000.000
				Nainaban	Nipu Nainaban	Penggemukan babi	36.000.000
				Sunkaen	Neklilo	Penggemukan babi	36.000.000
				Haumeni ana	Sinar Baru	Penggemukan babi	36.000.000
			Bikomi Utara	Napan	Bikliu	Peternak babi, Sapi, kambing	36.000.000
				Banain A	Setia Kawan	Peternak babi, Sapi, ayam kampung	36.000.000
				Banain B	Metfuiz	Peternak babi, Sapi	36.000.000
				Tes	Hidup Baru	Peternak babi, Sapi	36.000.000
				Faenake	Buataen	Peternak babi, kambing	36.000.000
		Alor	Alor Selatan	Subo	Mekar Wangi	Budidaya padi sawah, jagung dan cabe kriting	36.000.000
				Kelaisi Timur	Mekar	udidaya padi sawah, jagung dan cabe kriting	36.000.000
				Manmas	Mekar Jaya	udidaya padi sawah, jagung dan cabe kriting	36.000.000
				Kelaisi Tengah	Mekar Melati	Budidaya padi sawah, jagung dan cabe kriting	36.000.000
				Kelaisi Barat	Tetesan Embun	Budidaya padi sawah, jagung dan cabe kriting	36.000.000
			Alor Timur	Maukuru	Mekar I	Budidaya padi	36.000.000
				Baelana	Mekar	Budidaya padi, ternak babi dan kambing	36.000.000
				Padang panjang	Bater	Budidaya jagung, sayur, ubi petatas, pembelian fiber	36.000.000
				Tang Lapui Timur	Singupa	Budidaya padi, ternak ayam	36.000.000
				Kolana Selatan	Serba Usaha	Budidaya padi sawah dan paronisasi	36.000.000

		Malaka	Kobalima Timur	Alas	Serani	Budidaya kacang hijau	36.000.000
				Alas Utara	Buka Moris	Budidaya kacang hijau	36.000.000
				Alas Selatan	Halibur	Budidaya kacang hijau	36.000.000
				Kota Biru	Taruna	Budidaya kacang hijau	36.000.000
				Babulu Selatan	Ninin Tolu		36.000.000
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK	KEGIATAN USAHA	PENYALUR BANSOS
		Belu	Tasifeto Timur	Sarabau	Weau	Budidaya padi sawah	36.000.000
				Davala	Hokmidar	Budidaya padi sawah	36.000.000
				Takirin	Webasa	Budidaya padi sawah	36.000.000
				Halimodok	Alsabik	Budidaya padi sawah	36.000.000
				Sadi	Basarfehan	Budidaya padi sawah	36.000.000
9	Maluku Utara	Maluku Utara	Morotai Jaya	Pengeo		TP dan Peng. Pangan lokal	200.000.000
				Loleo		TP dan Peng. Pangan lokal	
				Towara		TP dan Peng. Pangan lokal	
				Garugo		TP dan Peng. Pangan lokal	
				Aru		TP dan Peng. Pangan lokal	
			Morotai Timur	Wewemo		TP dan Peng. Pangan lokal	200.000.000
				Gosoma Maluku		TP dan Peng. Pangan lokal	
				Buho-buho		TP dan Peng. Pangan lokal	
				Mira		TP dan Peng. Pangan lokal	
				Ino		TP dan Peng. Pangan lokal	
10	Maluku	Kep. Aru	Aru Selatan Timur	Batu Goyang	Selatan Timur	Perikanan	25.000.000
				Dosimar			25.000.000
				Meror			25.000.000
				Beltubur			25.000.000
		Maluku Tenggara Barat	Selaru	Adaut	Tonsare	Budidaya jagung	200.000.000
				Namtambuna			
				Lingat			
				Werain			

				Ilyasa			
			Nirunmas	Waturu	Nirunmas	Budidaya sayuran	200.000.000
				Tutukembung			
				Manglusi			
				Arma			
				Lorwembun			
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK	KEGIATAN USAHA	PENYALUR BANSOS
		Maluku Barat daya	Letti	Tomra	Sehati	Budidaya sayuran	200.000.000
				Batumiau	Watkorkora	Sapi/Kambing	
				Nuwewang	Niawarat		
11	Papua Barat	Raja Ampat	Waigeo Selatan	Sapokren			200.000.000
			Meos Mansar	Kabui			
12	Papua	Bovendigoel	Waropko	Kanggewot		Padi sawah	200.000.000
				Waropko		Ternak babi	
				Upyetetko		Ternak bebek	
				Winiktif			
				Upkim			
			Mindiptana	Kakuna		Ternak babi	
				Osso		Budidaya pisang	
				Wanggatibi			
				Kamka			
				Anggumbit			
		Supiori	Supiori Selatan	Awaki		Tanaman Pangan	200.000.000
				odori		Budidaya pisang	
				Warbefondi			
				Maryaidori			
				Biniki			
				Didiabolo			
			Kepulauan Aruri	Imbirsbari		Perikanan laut	200.000.000
				Manggoswam		Budidaya pisang	
				Wongkeina			
				Rayori			
				Mbruwandi			
		Keerom	Arso Timur	Wambes		Budidaya pisang	200.000.000
				kriku			
				Yetti			
				Wembi			
			Waris	Banda		Ternak babi	
				Kali Fam		Budidaya pisang	

				Kali Bom			
				Ampas			
		Pegunungan Bintang	Oksibil	Kabiding		Budidaya pisang	200.000.000
				Mabilabol			
				Okmakot			
				Aldom			
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK	KEGIATAN USAHA	PENYALUR BANSOS
			Serambakon	Modusit		Ubi jalar	
				Asipding		Budidaya pisang	
				yapimakot			
				Wambakom			
		Merauke	Sota	Sota	Poktan Sota	Ternak babi, peng. Pisang	200.000.000
				Toray	Poktan Yanggandur	Ternak babi, peng. Pisang	
				Erambu		Ternak babi, peng. Pisang	
				Rawa biru			
				Yanggandur			
			Noukenjerai	Tomerau	Poktan Wanninggap Nanggo	Tanaman Pangan, peng pisang	200.000.000
				Kuler	Poktan Onggaya	Ternak babi, peng. Pisang	
				Kondo		Tanaman Pangan, peng pisang	
				Onggaya			
				Tomer			

**Tabel 3: Pemanfaatan Bansos Kawasan Mandiri Pangan Kepulauan TA. 2013
(Tahap Kemandirian)**

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK	KEGIATAN USAHA	PENYALURAN BANSOS
1	Babel	Bangka Tengah	Koba	Guntung	Sejahtera	Perikanan	35.000.000
				Terentang		Dagang	40.000.000
				Penyak		Budidaya Pertanian	30.000.000
				Kurau		Budidaya Pertanian	55.000.000
				Kurau Barat		Pertanian, dagang	40.000.000
		Belitung	Sujuk	Sujuk	Laskar Pelangi	Perikanan	35.000.000
				Air Selumer		Dagang	40.000.000
				Pelepak Pute		Pertanian	30.000.000
				Sungai Padang			55.000.000
				Tanjung Tinggi			40.000.000
			Badau	Badau	Lestari	Perikanan (lele)	40.000.000
				Kacang Botor		Dagang	40.000.000
				Cerucuk		Pertanian Holtikultura	40.000.000
				Ibul			40.000.000
				Sungai Samak			40.000.000
		Belitung Timur	Simpang Pesak	Simpang Pesak	Simpang Pesak	Perikanan	200.000.000
				Dukong		Peternakan	
				Tanjung Kelumpang			
				Tanjung batu hitam			
			Damar	Sukamandi	Bertuah	Peternakan	200.000.000
				Mengkubang		Perikanan	
				Burong Mandi		Dagang	
				Mempaya			

				Aik Kelik			
2	Kepri	Lingga	Singkep Pesisir	Desa Lanjut		Pertanian. Hortikultura,	200.000.000
				Desa Kote		Sagu	
				Desa Berindat		Tanaman singkong	
				Desa Sedamai			
				Desa Pelaka			
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK	KEGIATAN USAHA	PENYALURAN BANSOS
		Natuna	Bunguran Barat	Desa Batubi Jaya			200.000.000
				Sedarat Baru			
				Semedang			
				Gunung Putri			
				Sedanau Timur			
			Bunguran Tengah	Harapan Jaya			200.000.000
				Tapau			
				Air Lengit			
3	NTT	Ende	Pulau Ende	Ndoriwoy	Gunung Kramat	Budidaya Ubi kayu, Kopra	36.000.000
				Redodori	Redodori Maju	Tenun ikat	36.000.000
				Rendo Raterua	Rendoraterua Bersama	Pengadaan beras, pembelian kopra, budidaya ubi kayu, tenun ikat	36.000.000
				Paderape	Alam Subur	Pembelian kopra, budidaya ubi kayu	36.000.000
				Puutara	Puutara Bangkit	Budidaya ubi kayu	36.000.000
			Maukaro	Kamubheka	Maju Bersama	Ternak babi dan kambing	36.000.000
				Kebirangga	Ndu Sama	Ternak babi, perkiosan, wrg bakso,	36.000.000
				Mundinggasa	Kasih Sayang	Ternak babi dan kambing	36.000.000
				Kebirangga Tengah	Tiwu Lewu	Agribisnis padi sawah, terbak babi	36.000.000
				Kolikapa	Kita Bersaudara	Ternak sapi, babi, kambing	36.000.000
		Sumba Timur	Kanatang	Kelurahan Temu	Hina Wangu	Beternak kambing	36.000.000
				Kuta	Kawara Hamu	Beternak kambing, pukat	36.000.000
				Hamba Paraing	Palonda Lima	Beternak kambing, pukat	36.000.000
				Mondu	Harapan Sama	Beternak kambing, pukat	36.000.000
				Ndapayami	Kabubul Mamila		36.000.000
			Haharu	Rambangaru	Kaludang Mamoru	Ternak babi, ayam, kios	36.000.000

				Praibakul	Pindu Lori	Ternak babi, ayam, kios	36.000.000
				Kadahang	Mula Mila/Kabubul Mamila	Ternak babi, ayam, kios	36.000.000
				Napu	Pa Ding Mamila	Ternak babi, ayam, kios	36.000.000
				Wunga	Suka maju	Ternak babi, ayam, kios	36.000.000
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK	KEGIATAN USAHA	PENYALURAN BANSOS
		Lembata	Kolior	Tubuk Rajan	Alap Nimo	Budidaya Padi	36.000.000
				Katakeja	Mekar	Budidaya Padi	36.000.000
				Ile Kimok	Lestari	Budidaya Padi	36.000.000
				Nuba Atalojo	Ina Kari		36.000.000
				Nubahaeraka	Lewo Dawan		36.000.000
			Parangbor	Bour	Lembah Makmur	Kios, Bengkel	36.000.000
				Waijarang	Ake Panik	Tenun ikat	36.000.000
				Pada	Karya Mandiri	Perkiosan, ternak sapi	36.000.000
				Bakalerek	KWT Gertak Wailiko		36.000.000
				Lite Ulumado	Getar		36.000.000
		Sikka	Palue	Reruairere	Wini Muri I	Budidaya kacang	36.000.000
				Maluriwu	Manunai	Budidaya kacang	36.000.000
				Kesokoja	Laki Soge I		36.000.000
				Ladolaka	Cempaka		36.000.000
				Tuanggeo	Mawar		36.000.000
			Alok Timur	Parumaan	Mawar	Jualan ikan	36.000.000
				La Sidi	Wabao	Ternak kambing	36.000.000
				Kojadoi	Watudang		36.000.000
				Kojagete	Du'a Loko	Budidaya kacang	36.000.000
				Pemana	Mawar Merah		36.000.000
				Gunung Sari	Mulia Tani		36.000.000
		Sumba Barat	Laboya Barat	Wetana	Wali Ate		36.000.000
				Gaura	Maida Ole		36.000.000

				Harona Kalla	Maida Ole		36.000.000
				Patiala Dete	Harapan Sama		36.000.000
				Lamboya Bawa	Setia Maju		36.000.000
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK	KEGIATAN USAHA	PENYALURAN BANSOS
			Loli	Wee Karou	Karya Mandiri II		36.000.000
				Diratana	Weemarama		36.000.000
				Sobawawi	Lala Morika		36.000.000
				Loda Pare	Suka Maju		36.000.000
				Weedabo			36.000.000
4	Maluku	Maluku Tenggara	Kei Besar	Ler Ohoilim	Fangnanan Yante	Ubi Kayu, Pengolahan Pangan Lokal	36.000.000
				Karkarit	Uruk	Ubi Kayu, Pengolahan Pangan Lokal,	36.000.000
				Daftel	Yante	Ubi Kayu, Pengolahan Pangan Lokal,	36.000.000
				Udar	Let Ngil	Ubi Kayu, Pengolahan Pangan Lokal, Nelayan Tangkap	36.000.000
			Kei kecil	Dian Darat	Sukamaju	Ubi Kayu, Hortikultura sayuran, peng lokal	36.000.000
					Yante	Ubi Kayu, pengolahan pangan lokal	36.000.000
				Dian Pulau	Senang	Ubi Kayu, Kacang tanah peng pangan lokal	36.000.000
					Kavin	Ubi kayu, hortikultura sayuran	36.000.000
				Madwat	Kerkabres	Ubi Kayu, Hortikultura sayuran dan perikanan	36.000.000
		Kota Tual	Tayando Tam	Tam Ngurhir	Tam Ngurhir	Ubi kayu	200.000.000
				Ohoitom		Jagung	
				Ngurnila		Rumput laut	
			Kur	Finuelan	Tubyal	Sayuran	200.000.000
				Tubyal		Rumput laut	
				Warkar		Ubi kayu	
				Lokwirin			

**Tabel 4: Pemanfaatan Bansos Kawasan Mandiri Pangan Papua TA. 2013
(Tahap Kemandirian)**

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK	KEGIATAN USAHA	PENYALURAN BANSOS
1	Papua Barat	Maybrat	Distrik Aitinyo	Iroh Mrar			200.000.000
			Aifat Utara	Mosun Utara			
		Tambrauw	Senopi	Wausin			200.000.000
			Kabar	Akmuri			
		Manokwari	Manokwari Utara	Saubeba			200.000.000
		Fak-fak	Fak-fak Barat	Sifatnanas			200.000.000
			Karas	Malakuli			
2	Papua	Jayapura	Kaureh	Soskotek		Budidaya ikan air tawar	200.000.000
				Sebun		Beternak babi	
				Lapua			
			Yapsi	Takwa Bangun		Beternak sapi	200.000.000
				Ongan jaya		Budidaya pisang	
				Bumi sahaya			
		Jayawijaya	Asolokobal	Nitiapulik		Budidaya ubi jalar	200.000.000
				Sowo		Budidaya keladi	
				Pobiatma		Budidaya tanaman jagung	
				Hitigima		Pembelian ternak babi	
				Wanilaima			
			Piramid	Pyramid		budidaya sawah	200.000.000
				Algonik		Sayuran	
				Perabaga			
				Yonggime			
		Biak Numfor	Andey	Warbinsi		Budidaya pisang	200.000.000
				Poidfu			
				Faknidi			
				Armu			
				Faknidi			

			Biak Timur	Insumarires		Budidaya pisang	200.000.000
				Kajabo			
				Rimba Jaya			
				Sepse			
				Sunday			
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK	KEGIATAN USAHA	PENYALURAN BANSOS
		Kepulauan Yapen	Kosiwo	Panduami		Budidaya pisang	200.000.000
				Ariepi			
				Tatui			
				Karmanap			
			Angkaisera	Woniwon		Budidaya pisang	200.000.000
				Yapanani			
				Borai			
				Menawi			
				Kalnui			
		Kota Jayapura	Muara Tami	Koya Barat		ternak babi, ayam	200.000.000
				Koya Timur		budidaya timun	
				skow Sae			
				Skow Mabo			
				Koya Tengah			
			Abepura	Desa Nafri		Budidaya sayuran	
				Awiyo		Ternak babi	
				Abepantai		Ternak ayam	
				Yobe			
				Enggros			
		Nabire	Makimi	Nifasi		Beternak bebek	200.000.000
				Biha		Budidaya pisang	
				Manunggal Jaya			
				Maedy			
				Legari Jaya			
			Napan	Mosan		ayam, bebek, babi	
				Masipawa			
				Weinami			
				Napan			
		Mimika	Agimuga	Mafasimamo		Budidaya pisang	200.000.000
				Aramsloki			
				Fakafuku			
			Mimika Baru	Timika Jaya		Budidaya padi sawah	
				Limau Asri			
				Nanaktipura			
		Waropen	Oudate	Sowiwa		Budidaya sayuran	200.000.000
				Morowa		Palawija	

				Rasawa			
				Baino Jaya			
				Botawa			
			Wapoga	Kamarsano		Budidaya sayuran	200.000.000
				Pirare		Budidaya pisang	
				Waweri			
				Usaiwa			
				Khemon Jaya			

Tabel 5 : Rencana Usaha Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
1	Aceh	Aceh Utara	Sawang	Teupin
				Punteut
				Lancok
				Paya Rabo Timur
				Paya Rabo Lhok
		Pidie Jaya	Ulim	Siblah Coh
				Grong-grong Capa
				Pulo Ulim
				Tijeen Usen
				Tanjong Ulim
		Aceh Besar	Lhoong	Keutapang
				Lamsujen
				Lamjuhang
				Utamong
				Lamgeuriheu
		Bireuen	Jeumpa	Blang Rheum
				Paloh Panyang
				Kuta Meuligoe
				Seunebok Lhong
				Cot Meugoe
		Kota Sibulussalam	Runding	Sepadan
				Dah
				Tualang
				Kuala Kepung
				Tanah Tumbuh
2	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Sikapas
				Batumundam
				Singkuang I
				Singkuang II
				Trans Singkuang SP I
		Nias	Botomuzoi	Tuhegafo
				Balohili Bot

				Hilimbowo Bot
				Hiliwaele II
				Onamolo Talafu
		Nias Selatan	Lahusa	Bawozihono
				Hilwatema
				Sarahiliaza
				Lahusa
				Orahili Bilaekha
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
3	Sumatera Barat	Pasaman Barat	Pasaman	Batang Biyu
				Tanjung Pangka
				Kampung Cubadak
				Rimbo Janduang
				Rimbo Binuang
		Sijunjung		
		Pesisir Selatan		
		Pasaman		
4	Jambi	Tanjung Jabung Barat	Berbak	Parit Pudir
				Karya Maju
				Sungai Baung
				Suwak Samin
				Teluk Nilau
		Tanjung Jabung Timur		Simpang,
				Rantau Makmur
				Sungai Rambut
				Rawasari
				Telgago Limo
5	Sumatera Selatan	Banyuasin	Muara Sugihan	Margo Rukun
				Sugih Waras
				Ganesha Mukti
				Sumber Mulyo
				Margo Mulyo
		Ogan Kemeiring Ilir	Lempuing	Kepayang
				Cahaya Maju
				Cahaya Makmur
				Sumber Makmur
				Kota Pandan
		Ogan Ilir	Lempuing	Kuta Pandan
				Cahaya Makmur
				Cahaya Maju
				Kepayang
				Sumber Makmur

6	Lampung	Tanggamus	Semaka	Sukaraja
				Sudimoro
				Sudimoro Bangun
				Sidodadi
				Sidodadi Asri
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
		Lampung Utara	Sungkai Jaya	Cempaka
				Cempaka Timur
				Negara Agung
				Sri Agung
		Tulang Bawang	Rawapitu	Gedung Jaya
				Doto Yosomulyo
				Bumisari
				Andalas cermin
				Sumber Agung
		Lampung Selatan	Palas	Pulau Tengah
				Palas Jaya
				Pandan Urip
				Mekar Mulya
				Rejomulyo
		Way Kanan	Negara Ban	Adijaya
				Negara Ban
				Negeri Mulya
				Gedung Jaya
				Kota Jawa
		Lampung Barat	Air Hitam	Sidodadi
				Sukajadi
				Sukadamai
				Menggarai
				SriMenan
7	Jawa Timur	Pamekasan	Larangan	Uncar
				Panaguan
				Larangan Dalam
				Larangan Luar
				Duko Timur
		Probolinggo	Gading	Prasi
				Keben
				Duren
				Betek Tama
				Renteng

		Sumenep	Ambunten	Belluk
				Campor
				Keles
				Sogian
				Tambak Agung Timur
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
		Sampang	Camplong	Banjar Talela
				Anggersek
				Madupat
				Plampaan
				Rabasan
8	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah	Batang Alai Timur	Batu Tangga
				Nateh
				Hinas Kiri
				Atiran
				Muara Hungi
		Barito Kuala	Tamban	Purwosari I
				Purwosari II
				Tamban Bangun
				Koanda
				Tamban Muara Baru
		Balangan	Lampihong	Mundar
				Matang Hanau
				Lajar
				Papuyun
				Sungai Awang
		Hulu Sungai Utara	Danau Panggang	Darussalama
				Palukahan
				Oandaman
				Sungai Nanang
				Sungai panangah
9	Kalimantan Tengah	Gunung Mas		
		Kotawaringin Barat	Kota Waringin Lama	Babual Baboti
				Tempayung
				Sakabulin
				Kinjil
				Sukajaya
		Kotawaringin Timur	Mentaya Hilir Selatan	Sungai Ijum Raya
				Sebamban

12	Maluku	Maluku Tenggara Barat		
		Maluku Tenggara		
		Buru		
		Seram bagian Timur		
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
13	Gorontalo	Gorontalo	Pulubala	Pulubala
				Pongongaila
				Molalahu
				Toyidito
				Ayumolinggo
		Bone Bolango	Bulango Ulu	Owata
				Mongilo
				Mongilo Utara
				Pilolaheya
				Sukamakmur
		Boalemo	Paguyaman Pantai	Limbatihi
				Lito
				Bubaa
				Bangga
				Bukit Karya
14	Sulawesi Selatan	Takalar	Mappakasungguh	Maccinibaji
				Mattirobaji
				Pa'batangan
				Patani
				Soreang
		Pangkep	Balocci	Kassi
				Tonasa
				Balocci Barat
				Balleangin
				Tompo Bulu
		Wajo	Tana Sitolo	Nepo
				Pajalele
				Mario
				Tancung
				Baru Tancung
		Luwu Timur	Tomoni Timur	Manunggal
				Purwosari
				Margomulyo
				Cendana Hitam

				Alam Buana
		Barru	Pujananting	Bulo-Bulo
				Jangan Jangan
				Patappa
				Pujananting
				Gattareng
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
		Bone	Barebbo	Cempaniga
				Bacu
				Cingkang
				Cinnong
				Congko
		Sinjai	Tellulimpoe	Mannanti
				Pattaongko
				Saotengah
				Sukamaju
				Massaile
		Tana Toraja	Bittuang	Pali
				Patongllang
				Buttulimbong
				Balla
				Kole Palian
		Toraja Utara	Tikala	Pangden
				Seraale
				Buntu Batu
				Embatau
				Benteng Ka;do'to,rea
15	Bengkulu	Seluma	Sukaraja	Bukit Peninjauan 2
				Sari Mulyo
				Sumber Makmur
				Sido Sari
				Niur
		Lebong		
16	Banten	Lebak		
		Serang		
17	Sulawesi Tenggara	Bombana	Tontonunu	Tontonunun
				Kongkoseng
				Puuwonua
				Tetehaka
				Watumelomba
		Buton	Wabula	Koholimombono
				Bajo Bahari
				Wabula

				Wabula 1
				Wasuemba
		Kolaka Utara	Batu Putih	Tetebao
				Parung Lampe
				Latowu
				Batu Putih
				Batu Api
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
		Muna	Lahorio	
				Lembo
				Kontu Kowuna
				Bahutara
				Kafofo
		Wakatobi	Wangi-Wangi Selatan	Numana
				Liya One Melangka
				Liya Mawi
				Liya Bakari
				Liya Tog
		Buton Utara	Kulisusu Barat	Dampala Jaya
				Mekar Jaya
				Kasula Tombi
				Labalanda
				Lambale
18	Sulawesi Barat	Mamasa	Sesenapadang	Orobua
				Paladan
				Marampan
				Lisuan Ada
				Orobua Timur
19	NTT	Sabu Raijua	Sabu Barat	Raedewa
				Ledekepaka
				Ledeana
				Mebba
				Raemadia
		Timor Tengah Selatan	Noebeba	Oebaki
				Eno Nabuasa
				Oepliki
				Fatutnana
				Naip
20	Bali	Karangasem		
		Badung		
21	Jawa Tengah	Blora	Kradenan	Ngrawoh
				Nginggil
				Getas

				Nglebak
				Getas
		Wonogiri	Pracimantoro	Petirsari
				Gambirmanis
				Jimbar
				Glinggang
				Wonodadi
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
		Jepara		Dudakawu
				Pendem
				Cepogo
				Bucu
				Jinggotan
		Banjarnegara	Mandiraja	Candiwulan
				Salamerta
				Somawangi
				Kebanaran
				Kaliwungu
22	Jawa Barat	Bandung Barat	Cipatat	Rajamandala Kulon
				Ciptarahardja
				Cipatat
				Gunung Masigit
				Mandalawangi
		Cirebon	Panguragan	Panguragan
				Panguragan Kulon
				Panguragan Lor
				Kalinyar
				Karang Anyar
		Garut	Mekarmukti	Mekarmukti
				Mekarsari
				Cijayana
				Jagabaya
				Karangwangi
		Tasikmalaya	Cigalontang	Lengkongjaya
				Parentas
				Tenjonagara
				Sirnajaya
				Jayapura
23	Riau	Kuantan Singingi		
		Rokan Hulu	Rambah Samo	Marga Mulya
				Rambah Samo
				Lubuk Bilang
				Rokan Timur
				Rokan Koto Ruang
24	DIY	Kulon Progo	Wates	Wates

				Giripeni
				Bendungan
				Triharjo
				Ngestiharjo